

**HUBUNGAN ANTARA KARAKTERISTIK MASYARAKAT
TERHADAP PEMAHAMAN POLITIK UANG
PADA MASA PEMILIHAN UMUM
(PERIODE 2015-2019)**
(Studi Di Desa Wates Selatan Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu)

Skripsi

Oleh

Kurnia Widya Putri



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRACT

**THE RELATIONSHIP BETWEEN THE CHARACTERISTICS OF THE
COMMUNITY TOWARDS UNDERSTANDING MONEY POLITICS
DURING GENERAL ELECTIONS
(2015-2019)
(Study in Wates Selatan Village, Gadingrejo Subdistrict, Pringsewu District)**

By

KURNIA WIDYA PUTRI

This study aims to determine the relationship between community characteristics of understanding money politics in Wates Selatan Village, Gadingrejo Subdistrict, Pringsewu District. This research method is explanatory using a quantitative approach. The characteristics intended in this study include the characteristics of education, the social and economic environment. Using questionnaires as the main tool of research supported by direct observation, interviews and literature studies as a reference in collecting research data, the data analysis technique used in this study is Product Moment using the SPSS application. The results of the study show that: there is a relationship between the characteristics of the community towards the understanding of money politics but it is not significant. The South Wates Village community has a variety of characteristics, with the understanding or knowledge of the community about money politics can be declared good, because the community knows the rules, forms, and regulations about money politics. The diverse characteristics of society do not have much influence on people's understanding of money politics. But the better the characteristics of the community influence the better knowledge of the respondents, in responding to the money politics events that occur. Community understanding of money politics events tends to be obtained from their experiences and observations during the general election period.

Keywords: Community Characteristics, Understanding, Money Politics

ABSTRAK

**HUBUNGAN ANTARA KARAKTERISTIK MASYARAKAT
TERHADAP PEMAHAMAN POLITIK UANG
PADA MASA PEMILIHAN UMUM
(PERIODE 2015-2019)
(Studi Di Desa Wates Selatan Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu)**

Oleh

KURNIA WIDYA PUTRI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara karakteristik masyarakat terhadap pemahaman politik uang di Desa Wates Selatan Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu. Metode penelitian ini adalah *Explanatory* dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Karakteristik yang dimaksudkan dalam penelitian ini meliputi karakteristik pendidikan, lingkungan sosial dan ekonomi. Menggunakan Kuesioner sebagai alat utama penelitian didukung dengan observasi langsung, wawancara dan studi pustaka sebagai acuan dalam mengumpulkan data penelitian, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Product Moment* dengan menggunakan aplikasi SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: terdapatnya hubungan diantara karakteristik masyarakat terhadap pemahaman politik uang tetapi tidak signifikan. Masyarakat Desa Wates Selatan memiliki keragaman karakteristik, dengan Pemahaman atau pengetahuan masyarakat tentang politik uang dapat dinyatakan baik karena masyarakat mengetahui pengetahuan, bentuk-bentuk, dan peraturan tentang politik uang. Karakteristik masyarakat yang beragam tidak banyak memberikan pengaruh terhadap pemahaman masyarakat tentang politik uang. Tetapi semakin baik karakteristik masyarakat berpengaruh terhadap semakin baik nya pengetahuan responden, dalam menyikapi peristiwa politik uang yang terjadi. Pemahaman masyarakat akan peristiwa politik uang cenderung didapatkan dari pengalamannya dan pengamatan selama mengikuti masa pemilihan umum berlangsung.

Kata Kunci: Karakteristik Masyarakat, Pemahaman, Politik Uang

**HUBUNGAN ANTARA KARAKTERISTIK MASYARAKAT
TERHADAP PEMAHAMAN POLITIK UANG
PADA MASA PEMILIHAN UMUM
(PERIODE 2015-2019)**
(Studi Di Desa Wates Selatan Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu)

Oleh

Kurnia Widya Putri

Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA SOSIOLOGI

Pada

Jurusan Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG

2019

Judul Skripsi

: **HUBUNGAN ANTARA KARATERISTIK
MASYARAKAT TERHADAP PEMAHAMAN
POLITIK UANG PADA PEMILIHAN UMUM
(PERIODE 2015-2019)
(STUDI DI DESA WATES SELATAN
KECAMATAN GADINGREJO KABUPATEN
PRINGSEWU)**

Nama Mahasiswa

: **Kurnia Widya Putri**

Nomor Pokok Mahasiswa

: 1516011093

Jurusan

: Sosiologi

Fakultas

: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Erna Rochana, M.Si

NIP. 19670623 199802 2 001

2. **Ketua Jurusan Sosiologi**

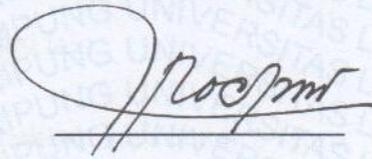
Drs. Ikram, M.Si

NIP. 19610602 198902 1 001

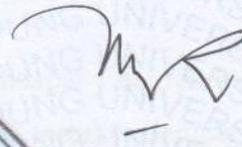
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Erna Rochana, M.Si



Penguji Utama : Drs. Usman Raidar, M.Si



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Syarif Makhya
NIP. 195908031986031003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 20 Mei 2019

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar Akademik (Master/Sarjana/Ahli Madya), baik di Universitas Lampung maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 26 Juni 2019

Yang Membuat Pernyataan,



KURNIA WIDYA PUTRI
NPM 1516011093

RIWAYAT HIDUP



Nama Kurnia Widya Putri, dilahirkan di Pringsewu pada 08 Juni 1997, merupakan anak dari pasangan bapak Santosa, S.Pd dan ibu Muji Rahayu, S.Pd merupakan anak kedua dari tiga bersaudara. Dalam keseharian biasanya dipanggil dengan nama Kurnia. Merupakan warga Negara Indonesia dan beragama Islam.

Pendidikan formal yang ditempuh:

1. TK. Aisyiyah Bustanul Athfal, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, diselesaikan pada tahun 2003
2. SD N 4 Wates, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, diselesaikan pada tahun 2009
3. SMP N 2 Gadingrejo, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, diselesaikan pada tahun 2012
4. SMA N 1 Gadingrejo, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, diselesaikan pada tahun 2015
5. Dan pada tahun 2015 tercatat sebagai mahasiswa Universitas Lampung pada Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan diselesaikan pada tahun 2019.

Lebih lanjut, terdaftar menjadi mahasiswa Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik melalui penerimaan mahasiswa jalur SBMPTN atau jalur tes.

Pada periode Pertama Bulan Januari sampai dengan Maret 2018 (selama 40 hari), penulis mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang bertempat di Desa Mulyosari Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran. Selama menjadi mahasiswa, mengikuti kegiatan kampus yaitu sebagai anggota HMJ Sosiologi Universitas Lampung. Pada tahun 2019, menyelesaikan Skripsi yang berjudul *“Hubungan antara Karakteristik Masyarakat terhadap Pemahaman Politik Uang pada Pemilihan Umum (Studi di Desa Wates Selatan Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu)”*.

MOTTO

“Jika Kau Tak Suka Sesuatu, Ubalah. Jika Tak Bisa,
Maka Ubahlah Cara Pandangmu Tentang Nya”

- Maya Angelou -

“Life Is The Art Of Drawing Without Eraser”

-Jhon W. Gardner-

“Tidak Apa-Apa Untuk Mulai Berjalan Dengan Langkah Kecil
Tetapi Terus Belatih dan Bersiaplah Untuk
Mengambil Langkah Yang Besar”

-Kurnia Widya Putri -

PERSEMBAHAN



Dengan mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah SWT,
skripsi ini Saya persembahkan kepada:

Bapak dan Ibuku Tercinta
Santoso, S.Pd. dan Mujirahayu, S.Pd.

Kakak dan Adikku Tersayang
Dani Kurniawan, Dila Anggista, dan Icha Sabrina Putri

Dosen Pembimbing dan Dosen Pembahas
Ibu Dr. Erna Rochana, M.Si
dan
Bapak Drs. Usman Raidar, M.Si

Kawan-kawan Seperjuanganku
Sosiologi 2015

Almamaterku
Keluarga Besar Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Lampung

Dan semua orang-orang baik dan terkasih yang sudah membantu penelitian
hingga sampai tahap ini.

Terimakasih atas dukungan, doa, saran dan kritik yang telah diberikan kepada
penulis, semoga Allah SWT selalu memberikan yang terbaik kepada kita semua,

Aamiin.

SANWACANA

Assalamualaikum, Wr. Wb.

Alhamdulillah,

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT.karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, skripsi yang berjudul “Hubungan Antara Karakteristik Masyarakat Terhadap Pemahaman Politik Uang Pada Pemilihan Umum periode 2015-2019 (Studi Di Desa Wates Selatan Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu) ini dapat terselesaikan tanpa kendala yang berarti. Pada prosesnya, saya banyak mendapatkan bantuan, bimbingan dan *support* dari berbagai pihak. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT yang senantiasa memberikan karunia dan ridho-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan proses pendidikan dan penyusunan skripsi ini dengan baik.
2. Terimakasih untuk kedua orang tua saya, Bapak Santosa, S.Pd dan Ibu Muji Rahayu, S.Pd. terimakasih atas semua dukungan, cinta, pengertian, dan kasih sayang yang telah ayah dan ibu berikan. Semoga nia nanti dapat membahagiakan kalian, terimakasih atas kerja keras kalian yang pasti nia tidak bisa gantikan untuk setiap tetes keringat ayah dan ibu.

3. Terimakasih untuk kedua kakak saya, Mas Dani Kurniawan dan Mbak Dila Anggista, dan adik saya Icha Sabrina Putri atas dukungan, semangat dan motivasi yang selama ini kalian berikan.
4. BapakDr. Syarief Makhya, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan IlmuPolitik Universitas Lampung.
5. Bapak Drs. Ikram, M.Si., selaku Ketua Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
6. Bapak Damar Wibisono, S.Sos., M.A., selaku Sekertaris Jurusan Sosilogi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung
7. Ibu Dr. Erna Rochana, M.Si.,selaku dosen Pembimbing Skripsi. Terimakasih atas waktu, tenaga, pikiran atau bahkan materiyang telah dicurahkan guna terselesaikannya skripsi ini.Terimakasih juga atas perhatian dan kesabaran ibu dalam membimbing saya saat proses pembuatan skripsi. Saya meminta maaf kepada ibu jika banyak perbuatan atau ucapan saya yang mungkin pernah menyakiti ibu. Dan Semoga ilmu yangtelah ibu berikan dapat berguna dikemudian hari.
8. BapakDrs. Usman Raidar, M.Si., selaku dosen Pembahas dan Pembimbing Akademik. Terima kasih atas bimbingan bapak selama masa perkuliahan yang saya lakukan dan saya menyadari begitubanyak kekurangandalam proses penulisan skripsiini.Terimakasihataskritik dan saran yang telah bapak berikan sehingga menjadikan skripsi inilebih baik.
9. Seluruh Dosen Sosiologi Universitas Lampung.Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan, semogailmu yang didapatkan selama kuliah bisa bermaanfaat dan berguna untuk masa depan.

10. Terimakasih untuk sahabat yang saya sayangi Wijayanti dan Yola Deska kalian adalah teman yang selalu memberikan dukungan, saran dan dorongan agar saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan semoga pertemanan kita bisa terus terjalin hingga kita dewasa dan tua nanti, *love you guys.*
11. *For one and only my motivation EXO, thank for being my mood booster and I hope someday, I can see you in real life, wait for me Kai oppa!!!*
12. Terimakasih untuk teman-teman seperjuangan Ratna Juita, Bobby Hermanto, Yola Monica, Cynthia Sagala, Vita Lutvia Anis, Mar'atus Sholeha, Yosi Yusika, Allifia Saputri, Tiara Putri Ranita, Aviani Novitasari, Rini Aryad, Yeni Octavia, Elyana, Iin Dwi Cahyani, Fitriani, Lilis Agestia, Achmad Junaidi, Rahmat Shandi Septiadi, M. Agung Rizki, dan semua teman-teman Sosiologi 2015 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang selalu memberikan semangat, motivasi dan membantu dalam proses penyelesaian skripsi.
13. Terimakasih untuk adik sekaligus teman sekamar selama hampir dua tahun kita sekamar Ferista Rusma L, dan tetangga yang sering dibilang adik Ade Nanda Felicia kalian adalah penyemangat dan teman yang menyenangkan.
14. Terimakasih untuk teman-teman kkn, Assyifa Salsabila, Haedar Azis Mahmud, Trisna Febriansyah, Vina Amelia, Sari Rahmawati, dan Andri Lukmasyah, terimakasih untuk 40 hari yang mengesankan dan menyenangkan selama kita bersama di desa Mulyosari dan semoga kita bisa berkumpul lagi.

15. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, namun telah membantu dan berpartisipasi dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata, penulis sepenuhnya sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi setidaknya saya berharap skripsi yang sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Bandarlampung, 26 Juni 2019

Kurnia Widya Putri
NPM. 1516011093

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRACT	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN JUDUL	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
PERNYATAAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN	x
SANWACANA	xi
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xiix
DAFTAR GAMBAR	xx
BAB I.PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat penelitian	10
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Pengertian Karakteristik.....	12
2.1.1 Karakteristik Pendidikan	13
2.1.2 Karakteristik Ekonomi	15
2.1.3 Karakteristik Usia.....	16
2.2 Pengertian Masyarakat	17
2.3 Pengertian Politik Uang	19
2.3.1 Bentuk-Bentuk Politik Uang	20

2.3.2 Peraturan Tentang Politik Uang	22
2.3.3 Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Politik Uang	23
2.4 Pengertian Pemilihan Umum	24
2.4.1 Asas-Asas Pemilihan Umum	25
2.4.2 Tujuan dan Fungsi Pemilu	27
2.5 Kerangka Teori	29
2.5.1 Teori <i>Rational Choice</i>	29
2.5.2 Teori Interaksi Simbolik	30
2.6 Kerangka Pikir	34
2.7 Hipotesis.....	36
BAB III.METODE PENELITIAN	38
3.1 Jenis Penelitian.....	38
3.2 Penentuan Lokasi Penelitian	38
3.3 Definisi Konseptual Dan Operasional Variable.....	39
3.4 Populasi dan Sampel	40
3.4.1 Populasi.....	40
3.4.2 Sampel	41
3.5 Jenis Data	42
3.6 Teknik Pengumpulan Data	42
3.7 Teknik Pengolahan dan Analisis Data	44
BAB IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	47
4.1 Sejarah Singkat Desa Wates Selatan	47
4.1.1 Sejarah Desa	47
4.1.2 Sejarah Pemerintahan Desa	48
4.2 Geografis Desa	49
4.3 Keadaan Penduduk	49
4.4 Keadaan Sosial	50
4.4.1 Pendidikan	50
4.4.2 Keagamaan	52
4.4.3 Perekonomian	53
BAB V. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	56
5.1 Karakteristik Masyarakat	56
5.1.1 Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Kelamin.....	58
5.1.2 Karakteristik Berdasarkan Jenjang Pendidikan.....	59
5.1.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan.....	60
5.1.4 Karakteristik Responden berdasarkan Status Pernikahan.....	62
5.1.5 Karakteristik Responden berdasarkan Tingkat Pendapatan	63
5.2 Pemahaman Politik Uang.....	64
5.2.1 Pengetahuan Responden terhadap Istilah	

Politik Uang	64
5.2.2 Bentuk-Bentuk Politik Uang	70
5.2.3 Peraturan Tentang Kegiatan Politik Uang.....	71
5.3 Sikap Masyarakat terhadap Kegiatan Politik Uang.....	75
5.4 Hubungan antara Karakteristik Responden terhadap Kegiatan Politik Uang	76
5.4.1 Hubungan Karakteristik Pendidikan dan Pemahaman Politik Uang	76
5.4.2 Hubungan Karakteristik Pendapatan dan Pemahaman Politik Uang	78
5.5 Perhitungan <i>Product Moment</i>	80
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	84
6.1 Kesimpulan.....	84
6.2 Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA.....	
LAMPIRAN.....	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Peringkat Negara	
Berdasarkan Jumlah Penduduk	4
Tabel 3.1. Definisi Operasional	40
Table 3.2 Aturan Pengambilan Keputusan <i>Product Moment</i>	46
Tabel 4.1 Nama-Nama Kepala Desa	
Desa Wates Selatan	48
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	
Desa Wates Selatan Tahun 2018	50
Tabel 5.1 Karakteristik Berdasarkan Jenis Kelamin	58
Tabel 5.2 Distribusi Responden berdasarkan	
Jenjang Pendidikan	59
Tabel 5.3 Distribusi Responden berdasarkan	
Karakteristik Pekerjaan	61
Tabel 5.4 Distribusi Responden Berdasarkan	
Status Pernikahan	62
Tabel 5.5 Distribusi Responden berdasarkan	
Karakteristik Tingkat Pendapatan	63
Tabel 5.6 Frekuensi Pemahaman Responden Terhadap	
Istilah Politik Uang	65
Tabel 5.7 Pengetahuan Responden tentang Peristiwa Politik Uang	
melalui Media Cetak dan Media Sosial	65
Tabel 5.8 Frekuensi Pemahaman Politik Uang berdasarkan	
Lingkungan Sosial Responden	67
Tabel 5.9 Frekuensi Tingkatan Pengenalan Responden	
Terhadap Kegiatan Politik Uang	68
Tabel 5.10 Pengatahuan Responden terhadap Bentuk-Bentuk	
Politik Uang	71

Tabel 5.11 Frekuensi Pemahaman Responden terhadap Peraturan Politik Uang	73
Tabel 5.12 Pengetahuan Responden terhadap Keberadaan BAWASLU (Badan Pengawas Pemilu).....	74
Tabel 5.13 Hubungan Karakteristik Pendidikan Terhadap Pemahaman Politik Uang	77
Tabel 5.14 Hubungan Karakteristik Pendapatan Terhadap Pemahaman Politik Uang	79
Tabel 5.19 Uji Korelasi <i>Product Moment</i>	81

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Jenjang Pendidikan di Indonesia	14
Gambar 2.2 Bagan Hubungan antara Karakteristik Masyarakat Dengan Pemahaman Politik Uang pada Pemilihan Umum	34
Diagram 4.1 Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Wates Selatan	51
Diagram 4.2 Data Pekerjaan Warga Desa Wates Selatan Tahun 2018.....	54
Gambar 5.1 Spanduk Tentang Gerakan Melawan dan Menolak Politik Uang	69

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia pada awalnya merupakan negara yang berasal dari kerajaan dimana pemimpinnya berasal dari garis keturunan dan tidak bisa secara langsung dipilih oleh masyarakat. Pada tahun 1955 negara Indonesia dapat dikatakan sebagai negara yang baru memulai untuk menjadi negara demokrasi. Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, dimana rakyat berperan langsung dalam pemerintahan dan kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat (Hadi Wiyono,2007), yang menggunakan Undang-undang No. 7 Tahun 1953 sebagai dasar terjadinya pemilihan umum pertama kali pada tahun 1955 di Indonesia untuk memilih anggota DPR dan anggota konstituante.

Asas pemilu Negara Indonesia adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Bab 2 Pasal 2 Tentang Pemilihan Umum). Asas ini menjadi dasar berlangsungnya pemilu atau pemilihan umum di Indonesia, Sejak reformasi digulirkan hingga kini, demokrasi menjadi ajang kebebasan berpolitik. Masyarakat diberikan hak untuk memilih pemimpin dan wakil yang mereka percaya untuk mengembangkan wilayahnya dengan jangka waktu 5 tahun.

Pemilihan umum adalah sebuah proses untuk mencapai otoritas secara legal formal yang dilaksanakan atas partisipasi kandidat, pemilih (konstituen), dan dikontrol oleh lembaga pengawas, agar mendapatkan legitimasi dari masyarakat yang disahkan oleh hukum yang berlaku. Negara demokratis berpusat pada masyarakat dalam proses pemerintahannya dan pemerintah hanya sebagai alat yang menjalankan sistem hukum dan memberikan kewajiban serta menjamin hak masyarakat dapat terlaksana dengan baik.

Adapun beberapa referensi dan karya ilmiah yang berkaitan dengan kasus *Money Politic* adalah:

1. Pada jurnal yang berjudul “*Vote buying dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada). (Studi kasus pilkada Surabaya dan pilkada Kabupaten Blitar tahun 2010)*” yang ditulis oleh Ali Sahab menjelaskan bahwa Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan fenomena politik uang di Kota Surabaya dan Kabupaten Blitar dalam pemilihan kepala daerah Surabaya dan Bupati Blitar tahun 2010 serta faktor penyebab terjadinya politik uang di masing-masing daerah.
2. Pada jurnal “*Praktek Money Politics Dalam Pemilu Legislative Di Kabupaten Pekalongan Tahun 2009 (Studi Sosio Legal Normatif)*” Oleh Sabilal Rosyad, berisi tentang Masyarakat Kabupaten Pekalongan menilai Money Politics sebagai sesuatu yang wajar karena alasan ekonomis dan sebagian karena ketidaktahuan mereka. Anggapan ini muncul disebabkan pragmatisme politik, yang tidak hanya dipraktekkan oleh para elit politik tetapi juga telah menyebar ke dalam kultur masyarakat.

3. Pada jurnal "*Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus di Desa Jatirejo Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri)*" Yang ditulis oleh Mohamad Amanu. penelitian ini berisi tentang ditemukannya bukti bahwa praktik politik uang dalam pemilihan kepala desa dilakukan oleh *expert agen* (kandidat calon kepala desa, tim sukses) dan *lay agen* yaitu pemilih selain tim sukses. Adapun cara yang dilakukan oleh agen dalam praktik politik uang yaitu melalui kegiatan kampanye. Sedangkan wujud dari politik uang sebagai sarana antara interaksi pada *expertagen* dan *lay agen* berupa uang tunai, barang dan pemberian janji-janji politik seperti pembangunan infrastruktur dan ziarah wali lima.
4. Pada jurnal yang berjudul "*Sikap dan pengetahuan masyarakat terhadap money politic dalam pemilu legislative tahun 2014*" di Gowa yang ditulis oleh Rahmatiah HL, Peneliatian ini menyoroti tetang sikap mayarakat yang cenderung bersikap pasif dan menerima tentang adanya peristiwa politik uang yang ada disekitar mereka.
5. Pada jurnla "*Persepsi Masyarakat Terhadap Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Desa Cemaga Selatan Kecamatan Bunguran Selatan Kabupaten Natuna Tahun 2013*" yang ditulis oleh Siswandi berisi tentang peran politik uang sebagai salah satu faktor kemenangan calon terpilih, kemenangan para calon legislative ditentukan dengan berapa besar uang yang diberikan. Warga masyarkat cenderung mengetahui tentang adanya praktek politik uang dan menanggapiya sebagi sebuah [eristiwa yang lazim terjadi ketika masa pemelihan umum berlangsung.

6. Pada jurnal “*Pencegahan Politik Uang dan Penyelenggaraan Pilkada yang Berkualitas: Sebuah Revitalisasi Ideologi*” yang ditulis oleh Indah Sri Utari berisi tentang Strategi pencegahan politik uang dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan seperti perubahan sistem penjurangan calon, pembenahan sistem seleksi administrasi para calon, pembenahan sistem pendataan pemilih, pembenahan sistem pelaksanaan kampanye, serta pembenahan sistem pemungutan suara.

Tabel 1.1 Peringkat Negara Berdasarkan Jumlah Penduduk

No	Negara	Jumlah Penduduk Total
1	Republik Rakyat Cina	1.306.148.035
2	India	1.065.070.607
3	Amerika Serikat	297.336.946
4	Indonesia	241.452.952
5	Brasil	184.101.109
6	Pakistan	159.196.336
7	Rusia	143.782.338
8	Bangladesh	141.340.476
9	Nigeria	137.253.133
10	Jepang	127.333.002

Sumber : *CIA World Factbook 2004*

Negara Indonesia merupakan salah satu negara dengan presentase jumlah penduduk yang tinggi dan merupakan salah satu negara yang menganut system demokratis. Kedua hal tersebut secara tidak langsung saling berkaitan satu dengan lainnya semakin besar masyarakatnya maka proses pemilu sebagai perwujudan partisipasi warga masyarakat sebagai sebuah negara yang demokratis dapat terlihat secara nyata. Di dalam sebuah pemilihan umum tingkat sebuah keberhasilan pemilu diukur dari tingkat partisipasi warga

negaranya, semakin banyak yang berpartisipasi dalam pemilihan tersebut dapat diartikan bahawa pemilihan tersebut berhasil.

Namun saat ini banyak terjadinya kecurangan dalam proses pemilihan umum yang sangat menghawatirkan masa depan bangsa. Hal tersebut mencoreng asas yang menjadi dasar pemilihan umum yang ada dan membuat permasalahan di dalam masyarakat. Permasalahan yang sekarang ini banyak terjadi didalam pemilihan umum antara lain, kurangnya partisipasi masyarakat, kurangnya kebebasan masyarakat untuk memilih karena adanya tekanan-tekanan dari pihak-pihak luar yang memiliki kepentingan lain, dan yang saat ini menjadi permasalahan yang paling sering didengar didalam masyarakat tentang pemilu yaitu adanya praktek politik uang.

Kejadian-kejadian berupa pelanggaran dalam pemilu sering terjadi khususnya pada masa kampanye, kampanye merupakan proses komunikasi politik pada masa pemilihan umum, komunikasi antara pemilih dengan yang dipilih yaitu rakyat dan partai politik atau calon bakal terpilih. Kegiatan kampanye pada pemilihan umum adalah proses mempersuasi khalayak untuk bersedia menerima, mendukung, dan akumulasinya adalah memilih partai atau kandidat yang dikampanyekan (Undang-Undang tentang kampanye pemilu Presiden dan Wakil Presiden sendiri telah di atur di dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden). Kampanye merupakan kegiatan dimana masyarakat akan secara halus dihasut untuk memilih calon yang ada sebagai pemimpin yang akan dipilih dalam proses pemilihan umum dengan visi-misi yang dijadikan alat untuk menarik masa sebagai basis pendukungnya.

Kampanye bertujuan mendapatkan pencapaian dukungan, biasanya dilakukan oleh sekelompok orang yang terorganisir untuk melakukan strategi pencapaian dalam rangka untuk menyukseskan kampanye tersebut. Dalam rangka memenangkan perhitungan suara itulah, berbagai upaya untuk memikat dan memperoleh suara rakyat, berdasarkan kegiatan yang diperbolehkan untuk dilakukan, dan tidak melanggar hukum resmi pemilihan umum.

Kegiatan *Money Politics* (politik uang) merupakan kegiatan yang banyak dilakukan oleh para calon kandidat maupun dari tim sukses guna meraup suara dan simpatisan, Mekanisme semacam ini tentu memiliki pertimbangan hukum dan apabila dilaksanakan mesti memiliki implikasi, baik yang direncanakan atau diharapkan maupun yang tidak diharapkan.

Seperti yang terjadi di Provinsi Lampung dalam beberapa surat kabar yang memberitakan telah terjadinya peristiwa tersebut selama masa pemilihan gubernur yang belum lama ini berlangsung. Banyak kasus-kasus tentang politik uang yang saat ini banyak ditemukan dimasyarakat contoh nyata kasus politik uang yang baru-baru ini terjadi ada di wilayah lampung, dimuat dilaman *Tribun News* (pada 14 juli 2018), menyebutkan bahwa terdapat calon pasangan terpilih yang melakukan politik uang untuk mendapatkan suara dalam pemilihanya. dan pada laman surat kabar *Tempo* (yang dimuat pada 3 juli 2018), terdapat berita tentang peristiwa politik uang dan disebutkan bahwa Polisi dan BAWASLU akan melakukan penyelidikan akan tindakan politik uang yang dituduhkan kepada calon pasangan terpilih. Di beberapa daerah juga secara nyata ditemukan kasus tersebut dimana masyarakat

diberikan beberapa barang yang ditujukan agar masyarakat dapat memilih pasangan yang memberikan hal tersebut. Serta dari hasil survey yang dilakukan oleh LSN (Lembaga Survei Nasional), pemilihan umum 2014 rawan terjadi politik uang. Mayoritas masyarakat mengaku bersedia menerima pemberian uang dari para calon legislator atau partai politik menjelang pelaksanaan pemilu legislatif 9 April 2014 kemarin. Sebanyak 69,1 persen mengaku bersedia menerima pemberian uang dari caleg atau partai, meskipun dengan alasan atau dalih yang berbeda-beda. Sementara pada pemilu 2009, survei LSN mengenai politik uang menunjukkan masih kurang dari 40 persen publik yang bersedia menerima pemberian uang dari caleg atau partai. Dari 1.230 responden di 34 provinsi se Indonesia, hanya 30,9 persen responden yang dengan tegas akan menolak pemberian uang dari caleg atau partai manapun. Berdasarkan besarnya persentase responden yang bersedia menerima pemberian uang dari caleg atau partai merupakan indikator nyata bahwa potensi politik uang dalam pemilu 2014 sangat tinggi. Serta di wilayah Wates Selatan sendiri disinyalir terdapat 60% masyarakat menerima bentuk-bentuk kegiatan politik uang dan mengetahui tentang adanya kegiatan politik uang disekitarnya.

Politik uang mempunyai dampak–dampak yang akan berpengaruh dimasa depan baik untuk masyarakat ataupun untuk para elit politik, pada saat masa kampanye para bakal calon dan partai politik memerlukan biaya yang tidak sedikit, jika biaya itu berasal dari kantong pribadi saat terjadinya politik uang maka biaya yang diperlukan pasti bertambah banyak anggota calon yang

memerlukan donator, untuk membiayai proses pemilihan dan saat para calon bakal terpilih menjadi pemimpin atau anggota pemerintahan maka mereka akan meminta balasan jasa dari apa yang sudah donatur berikan, balasan yang mungkin akan membuat permasalahan bagi masyarakat dampak yang mungkin akan timbul adalah terciptanya kebijakan atau peraturan yang semena-mena, yang akan menguntungkan beberapa pihak, meningkatnya angka korupsi. Selain itu jika dana yang didapatkan dari investor asing, maka hal tersebut akan semakin rumit karena para investor pasti ingin memperoleh hal yang lebih besar dari apa yang mereka berikan bisa berupa kebijakan yang mempermudah para investor untuk melakukan perluasan usaha ataupun proyek-proyek yang sedang mereka bangun. Bahaya tersebut akan sangat berdampak bagi kehidupan masyarakat, bisa saja masyarakat akan lebih susah dari kehidupan biasanya kerana pemerintahan yang sudah dikuasai oleh pihak-pihak asing yang pastinya tidak memihak masyarakat.

Tetapi saat ini, kurangnya pengetahuan tentang politik uang merupakan salah satu tindakan yang melanggar hukum dan kecenderungan masyarakat yang bersikap pasif atau kurang peduli akan hal tersebut juga menjadi suatu permasalahan. Berikut ini pandangan tentang definisi dari bentuk politik uang yang merupakan salah satu faktor penyebab banyak pandangan tentang bentuk-bentuk politik uang, Zoelva (2014) dalam bukunya yang berjudul "*Instrument Hukum dan Penindakan Money Politic* " memberikan beberapa bentuk politik uang diantaranya, antara lain :

1. *Money politic* pada lapisan atas yaitu transaksi elit politik/pemilik modal dengan calon terpilih sebagai modal dalam pemilihannya dan

setelah terpilih maka adanya pembayaran kembali atas modal yang sudah diberikan biasanya berupa sebuah kebijakan yang digunakan untuk mempermudah keperluan pemilik modal.

2. *Money politic* lapisan tengah yaitu transaksi antara bakal calon terpilih dengan elit partai politik yang mengusung bakal calon agar menjadi orang yang akan dicalonkan sebagai bakal calon, atau antara elit politik dengan penyelenggara untuk mengatur no urut bakal calon.
3. *Money politic* lapisan bawah, yaitu antara elit politik dan calon bakal terpilih dengan masa pemilih, bentuk inilah yang sering ditemukan secara langsung bentuk transaksinya bisa berupa uang atau sembako ataupun bentuk lainnya yang bertujuan untuk menghasut para calon pemilih agar memilih bakal calon terpilih tindakan inilah yang merupakan tindakan yang mencoreng politik karena bertindak tidak jujur dan transparan sebagaimana mestinya unsur politik.

Pada UU Nomor 10 Tahun 2016 menjelaskan sanksi terhadap pelaku politik merupakan dasar hukum dari politik uang tetapi kurangnya ketertarikan dan kurangnya pemberitahuan tentang pasal ini membuat masyarakat kurang memahami tentang peristiwa politik uang. Karena peristiwa inilah yang membuat penelitian ini memuat tentang keadaan yang sebenarnya didalam masyarakat terhadap fenomena politik uang dan bagaimana pemahaman masyarakat terhadap politik uang pada masa pemilihan umum yang berlangsung khususnya di Desa Wates Selatan.

1.2 Rumusan Masalah

Dari ulasan latar belakang di atas rumusan masalah yang akan diteliti pada penelitian ini adalah bagaimana hubungan antara karakteristik warga dalam pemahaman terhadap politik uang pada pemilihan umum.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui adakah hubungan antara perbedaan karakteristik masyarakat terhadap pengetahuan mereka tentang peristiwa politik uang selama masa pemilihan umum, dan selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk menciptakan para pemilih dimasa depan yang lebih berkualitas.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pengetahuan tentang pemahaman politik uang dalam proses pemilu dan khususnya pada mata kuliah Sosiologi Politik. Selain itu penelitian juga diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan untuk penelitian dengan topik pembahasan yang serupa.

2. Kegunaan praktis

a. Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah pemahaman masyarakat tentang politik uang yang sekarang ini marak terjadi selama pemilihan umum.

- b. Penelitian ini diharapkan agar dapat membuat masyarakat lebih tanggap terhadap fenomena politik uang, karena politik uang merupakan kegiatan yang dapat merusak nilai dan norma serta melanggar hukum..
- c. Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk para calon bakal terpilih dan para elit politik dapat lebih menjaga semangat sportifitas agar pemilu ini bisa berlangsung damai tanpa adanya tindakan-tindakan yang tidak terpuji yang mencoreng sopan satun politik dan semangat demokratis bangsa.
- d. Penelitian ini juga diharapkan agar masyarakat dapat lebih menikmati haknya sebagai pemilih untuk merasakan pesta demokrasi yang penuh dengan kedamaian dan kemeriahan tanpa adanya tekanan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
- e. Penelitian ini juga diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang lebih bijak dalam memilih pemimpin yang akan bertanggung jawab pada masa depan bangsa.

BAB.II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Karakteristik

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008) karakteristik memiliki pengertian mempunyai sifat khas sesuai dengan perwatakan tertentu, atau artinya sesuatu yang memiliki sifat khas untuk menunjukkan dirinya. Menurut Gibson, James L yang dialih bahasakan oleh Nunuk Ardiani (1996) bahwa yang dimaksud dengan karakteristik individu adalah kemampuan atau kecakapan, latar belakang dan demografi. Klasifikasi dari demografi adalah jenis kelamin dan ras. Perilaku pekerja menentukan hasil. Mereka dapat menghasilkan prestasi jangka panjang yang positif dan pertumbuhan diri atau sebaliknya, prestasi jangka panjang yang jelek atau kurang berkembang.

Karakteristik merupakan sebuah pembeda seseorang dengan orang lain atau sesuatu dengan sesuatu yang lainnya, bisa berupa sebuah keistimewaan ataupun bisa sebuah kelemahan yang membuat seseorang atau sesuatu itu berbeda dari sesuatu yang sama. Karakteristik setiap benda atau pun makhluk hidup didunia ini memiliki pembeda walaupun itu pada seseorang sama atau kembar. Perbedaan itu yang menjadi sebuah ciri dari orang atau benda itu. Sebuah karakteristik bisa

didapatkan sejak dia lahir atau pun berkembang dengan berkembangnya waktu yang didapatkan melalui proses tertentu, karakteristik dapat membedakan individu dengan individu lainnya didalam masyarakat, walaupun didalam masyarakat mereka tinggal dan menetap disebuah lingkungan yang sama tetapi karakteristik dari individu tersebut yang membedakannya dengan yang lain, berikut beberapa karakteristik masyarakat yang menjadi dasar dalam penelitian ini, antara lain:

2.1.1 Karakteristik Pendidikan

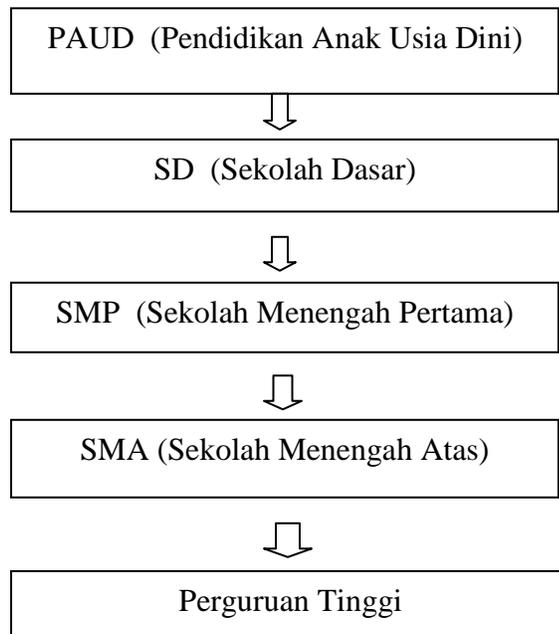
Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Nomor 20 Tahun 2003 mendefinisikan, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Dalam bahasa yang berbeda, “Bapak Pendidikan Nasional” Dewantara dalam Warli dan Yuliana (2011) menyatakan bahwa:

“ pendidikan merupakan daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran (intellect) dan tubuh anak.”

Tujuan pendidikan disebut juga dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 dalam pasal 3 adalah sebagai berikut

“pendidikan bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

Tahapan jenjang sekolah yang ditempuh di Indonesia



Gambar 2.1 Jenjang Pendidikan di Indonesia

Karena di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui maka di Indonesia juga terdapat sekolah-sekolah dengan dasar agama seperti Madrasah Ibtidaiyah (disingkat MI) pendidikan keagamaan yang berciri khas agama Islam yang setara dengan jenjang pendidikan SD, Madrasah Tsanawiyah (disingkat MTs) jenjang pendidikan keagamaan yang berciri khas Agama Islam setara dengan jenjang pendidikan SMP, kemudian Sekolah Menengah Kejuruan (disingkat SMK)

jenjang pendidikan menengah dengan jenis pendidikan kejuruan yang menyelenggarakan program 3 tahun dan merupakan kelanjutan dari SMP yang setara dengan jenjang pendidikan SMA dan Madrasah Aliyah (disingkat MA) yang merupakan jenjang pendidikan menengah atas yang tergolong jenis pendidikan keagamaan yang berciri khas Agama Islam, setara dengan jenjang pendidikan SMA, dan terdapat beberapa juga pendidikan dengan jenjang dan jenis serupa yang memiliki ciri khas agama lain yang ada di Indonesia.

Pendidikan merupakan karakteristik yang membedakan masyarakat berdasarkan tingkat pengetahuannya, semakin tinggi jenjang sekolah yang ditempuh maka dapat diartikan seseorang tersebut memiliki pengetahuan yang lebih luas didalam masyarakat. Pendidikan atau tingkat pengetahuan ini akan dapat mengukur seberapa luas pengetahuan masyarakat akan peristiwa politik uang.

2.1.2 Karakteristik Ekonomi

Ekonomi merupakan salah satu karakteristik yang penelitian ini cantumkan karena ekonomi merupakan salah satu pembeda yang dapat terlihat, dapat diteliti dari apakah pekerjaan responden, bagaimana keadaan tempat tinggal responden ataupun dapat diobservasi dari bagaimana orang tersebut berpenampilan. Dari karakteristik ekonomi ini penelitian ingin bertujuan untuk mengetahui apakah tingkatan perekonomian seseorang dapat berpengaruh terhadap tingkat pemahaman masyarakat tentang politik uang. Ekonomi juga merupakan salah satu faktor penyebab politik uang dapat terjadi, karena salah satu objek dari para

elit politik atau bakal calon terpilih untuk melakukan tindakan politik uang adalah karena adanya kemiskinan, tingkat kemiskinan yang tinggi dan susahny masyarakat mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhannya merupakan sebab kenapa ekonomi dapat menimbulkan tindakan seperti politik uang dapat terjadi, karena masyarakat cenderung akan memilih orang yang memberikan mereka pendapatan untuk memenuhi kebutuhannya. Hal inilah yang melatarbelakangi tingginya tingkat politik uang terjadi didalam pemilihan umum (pemilu).

2.1.3 Karakteristik Usia

Kamus Umum Bahasa Indonesia (1974) menyatakan bahwa, "*Usia (umur) adalah lama waktu hidup atau ada (sejak dilahirkan atau diadakan)*". Dalam pemilihan umum terdapat standar batasan umur yang digunakan sebagai syarat sah dalam keikutsertaannya yaitu wajib memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk). Warga Negara Indonesia yang memiliki KTP adalah warga masyarakat dengan usia 17 tahun keatas sebagai syarat administrasinya, karena pada umur tersebut warga masyarakat dapat dikategorikan sebagai dewasa dapat bertanggung jawab atas apa yang menjadi pilihannya dan dapat ditindak secara hukum jika melanggar aturan yang ada.

Karakteritik usia berperan dalam kegiatan sosial individu, kegiatan sosial merupakan kegiatan yang melibatkan seorang individu didalam kegiatan masyarakat seperti pertemanan atau perkumpulan lainnya. Keeratan tingkat pergaulan seseorang pada sebuah kelompok juga memiliki pengaruh terhadap

sikap dari individu tersebut karena terdapat kesamaan tujuan ataupun kesamaan pemikiran. Lingkungan sosial disekitar individu dapat mempengaruhi pola pikir seseorang dalam menanggapi sebuah permasalahan atau sebuah peristiwa.

2.2 Pengertian Masyarakat

Masyarakat adalah golongan masyarakat kecil terdiri dari beberapa manusia, yang dengan atau karena sendirinya bertalian secara golongan dan pengaruh mempengaruhi satu sama lain. (Shadily 1984).

Menurut Polak masyarakat merupakan wadah segenap antar hubungan sosial terdiri atas banyak sekali kolektiva-kolektiva serta kelompok dalam tiap-tiap kelompok terdiri atas kelompok-kelompok lebih baik atau sub kelompok. Menurut Djodiguno tentang masyarakat adalah suatu kebulatan dari pada segala perkembangan dalam hidup bersama antar manusia dengan manusia (dalam Ahmadi 2003).

Pendapat lain mengenai masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, adat istiadat yang sama-sama ditaati dalam lingkungannya Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam kehidupan bermasyarakat menurut Ahmadi (2003):

- a. Harus ada pengumpulan manusia, dan harus banyak, bukan pengumpulan binatang.
- b. Telah bertempat tinggal dalam waktu yang lama dalam suatu daerah tertentu.

- c. Adanya aturan-aturan atau undang-undang yang mengatur mereka untuk menuju kepada kepentingan-kepentingan dan tujuan bersama.

Dari penjelasan dan ciri-ciri di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat adalah sekelompok manusia majemuk yang tinggal dalam satu teritorial tertentu dan terdiri dari beraneka ragam kelompok yang memiliki kesepakatan bersama berupa aturan-aturan ataupun adat-istiadat yang timbul dan tercipta karena kebersamaan tersebut. Adanya aturan atau adat ini sangat bergantung dengan masyarakat itu sendiri dan juga kesepakatan bersama yang timbul setelah kehidupan itu berlangsung dalam waktu yang lama.

Konsep Masyarakat menurut Suharto (2006) adalah arena dimana praktek pekerjaan sosial makro beroperasi. Berbagai definisi mengenai masyarakat biasanya diterapkan berdasarkan konsep ruang, orang, interaksi dan identitas. Dalam arti sempit istilah masyarakat merujuk pada sekelompok orang yang tinggal dan berinteraksi yang dibatasi oleh wilayah geografis tertentu seperti desa, kelurahan, kampung, atau rukun tetangga. Dalam arti luas, masyarakat menunjuk pada interaksi kompleks sejumlah orang yang memiliki kepentingan dan tujuan bersama meskipun tidak bertempat tinggal dalam satu wilayah geografis tertentu. Masyarakat seperti ini bisa disebut sebagai *societas* atau *society*. Misalnya, masyarakat ilmuwan, masyarakat bisnis, masyarakat global dan masyarakat dunia.

2.3 Pengertian Politik Uang

Politik uang dalam Bahasa Indonesia adalah suap arti suap dalam buku kamus besar Bahasa Indonesia adalah uang sogok. Politik uang adalah pertukaran uang dengan posisi/ kebijakan/ keputusan politik yang mengatasnamakan kepentingan rakyat tetapi sesungguhnya demi kepentingan pribadi/ kelompok/ partai (Kamus Besar Bahasa Indonesia,1994).

Politik uang adalah suatu upaya memengaruhi orang lain (masyarakat) dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual-beli suara pada proses politik dan kekuasaan serta tindakan membagi-bagikan uang, baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih (Didik Supriyanto).

Politik Uang dapat diartikan sebagai upaya mempengaruhi perilaku orang lain dengan menggunakan imbalan tertentu. Ada yang mengartikan politik uang sebagai tindakan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan. Tindakan itu bisa terjadi dalam jangkauan (*range*) yang lebar, dari pemilihan kepala desa sampai pemilihan umum suatu Negara (Thahjo Kumolo,2015).

Dapat disimpulkan politik uang merupakan sebuah bentuk pelanggaran dalam sebuah proses pemilihan umum yang menggunakan benda atau jasa sebagai alat tukar dan merupakan bentuk-bentuk tindakan yang melanggar hak seorang pemilih karena tidak sesuai dengan asas yang telah ditaati ataupun dibuat didalam peraturan perundang-undangan.

2.3.1 Bentuk-Bentuk Politik Uang

Politik uang (*money politic*) merupakan sebuah pelanggaran dalam proses pemilu pada masa kampanye. Politik uang digunakan untuk membeli suara rakyat agar memilih bakal calon, bukan hanya dalam bentuk uang secara langsung tetapi bisa dengan hal-hal yang bertujuan sama, dan berikut merupakan bentuk-bentuk politik uang yang terjadi. Hastuti dkk (2012) penyebaran politik uang umumnya dilakukan dengan menggunakan dua bentuk yaitu :

1. Kampanye: Merupakan suatu proses yang dirancang dan direncanakan secara sadar, bertahap, dan berkelanjutan dan dilaksanakan dalam rentang waktu tertentu dengan tujuan mempengaruhi khalayak yang telah ditetapkan. Dalam kampanye ini biasanya dimanfaatkan untuk pemberian uang maupun barang berupa sembako maupun atribut atribut lainnya.
2. Serangan fajar: Merupakan cara yang dilakukan menjelang pencoblosan dengan usaha mendatangi rumah-rumah calon pemilih agar memilih kandidat tertentu dalam pemilihan umum.

Dan wujud dari politik uang tersebut dapat berupa, antara lain:

a. Uang

Uang merupakan alat pertukaran yang digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, uang merupakan sarana penting untuk menunjang kehidupan manusia. Ada sebuah istilah yang menggambarkan tentang uang saat ini "*times is money*" waktu adalah uang sebagian besar waktu yang

digunakan oleh seseorang adalah untuk mencari dan mendapatkan uang. Uang menjadi prioritas utama dalam kehidupan masyarakat, maka dari sebagian pihak yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan hal tersebut untuk kepentingannya, untuk mewujudkan keinginannya. Pada saat periode politik uang digunakan sebagai alat pembeli suara rakyat tidak dilakukan secara langsung biasanya terjadi secara diam-diam karena memberikan uang pada pemilih dengan tujuan untuk memberikan suara merupakan sebuah bentuk pelanggaran dalam pemilu dan dapat ditindak secara hukum. Jacobson mempertegas hal ini dengan mengatakan :

“Money is not sufficient, but it is necessary for successful campaign. Money is necessary because campaigns do have impact on election results and campaign cannot be run without it” (Uang saja tidak cukup, tapi uang sangat berarti bagi keberhasilan kampanye. Uang menjadi penting karena kampanye memiliki pengaruh pada hasil pemilu dan kampanye tidak akan berjalan tanpa ada uang).(Jacobson 1980: 33 dalam Badoh & Husodo 2009: 5)

b. Bahan Kebutuhan Pokok

Dalam hal ini penulis melihat secara langsung bahwa kebutuhan pokok juga merupakan salah satu bentuk politik uang , para calon bakal terpilih dan para elit politiknya memberikan bahan kebutuhan pokok seperti beras, gula, minyak makan , bahkan juga bahan kebutuhan sandang seperti jilbab dan sarung. Hal tersebut terjadi diwilayah penelitian belum lama ini masyarakat dibagikan hal tersebut yang bertujuan untuk membeli suara rakyat atau membeli hak pemilih rakyat.

c. Fasilitas

Politik uang ini dilakukan dengan cara pengumpulan kelompok dengan pemberian sumbangan berupa bantuan pembangunan sarana dan prasarana maupun pemberian janji-janji politik ketika kandidat nantinya terpilih dalam kontestasi pemilihan (Hastuti dkk, 2012, hlm. 7)

2.3.2 Peraturan Tentang Politik Uang

Pemerintah dan KPU (komisi pemilihan umum) membuat beberapa peraturan yang telah disahkan tentang politik uang , diantaranya :

- a. Undang undang no. 3 tahun 1999 pasal 73 ayat 3, dan diperbaharui lagi dalam UU Pemilu 2008 yang diterbitkan oleh Presiden SBY dalam lembar Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Pasal 84, Ayat 1 Huruf J berikut bunyi lengkapnya:

“barang siapa pada waktu diselenggarakannya pemilihan umum menurut undang-undang ini dengan pemberian atau janji menyuap seseorang, baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu, dipidana dengan pidana hukuman penjara paling lama tiga tahun. Pidana itu dikenakan juga kepada pemilih yang menerima suap berupa pemberian atau janji berbuat sesuatu.”

- b. Pada undang-undang No 07 Tahun 2017 paragraf 2 pasal 97

Bawaslu merupakan badan yang mengawasi terjadi pelanggaran pemilu seperti terjadinya praktik politik uang, memutuskan bila terjadi sengketa politik, dan mengawasi proses kampanye yang sedang berlangsung.

- c. Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang No. 32 tahun 2004 yang menyebutkan,

“Pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih”. Kemudian pada ayat (2)-nya, “pasangan calon dan/atau tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon oleh DPRD.”

- d. Undang-undang pemilu 2008 Nomor 10 pasal 265, menyebutkan bahwa

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan seseorang atau dengan memaksa atau dengan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memperoleh dukungan bagi pencalonan anggota DPD dalam pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, dipidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)”

2.3.3 Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Politik Uang

Pada sebuah peristiwa selalu terdapat faktor-faktor yang melatarbelakangi peristiwa tersebut terjadi. dan terjadinya peristiwa politik uang tentu memiliki latar belakang dan berikut ini beberapa faktor penyebab terjadinya peristiwa politik uang, antara lain :

- a. Faktor ekonomi

Politik uang sangat indentic dengan pemberian uang ataupun barang kepada masyarakat untuk membeli hak pilih orang tersebut. Standar kebutuhan yang terus meningkat membuat masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan atau pekerja dengan penghasilan renadah mengalami kesulitan. Maka dari itu banyak elit politik yang memanfaatkan hal tersebut untuk membeli hak pilih

rakyat, dan kenapa masyarakat bersikap cenderung pasif akan hal tersebut karena masyarakat cenderung merasa terbantu karena secara gratis mereka diberikan uang ataupun bahan kebutuhan pokok yang mereka butuhkan. Kecenderungan menerima itulah yang menyebabkan maraknya peristiwa politik uang dimasyarakat.

b. Faktor Ketidaktahuan

Faktor ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi tentang politik uang ataupun pelanggaran pemilu lainnya. Masyarakat yang pasif akan cenderung merasa malas untuk mencari tahu karena merasa ada hal lain yang lebih penting. Ketidaktahuan itu yang menyebabkan masyarakat akan menganggap bahwa hal itu wajar dan barang-barang atau uang yang diberikan adalah bantuan dan bukan hal ilegal atau melanggar aturan.

c. Sanksi Yang Kurang Tegas

Sanksi yang kurang tegas membuat para calon terpilih berani untuk melakukannya. Sanksi yang kurang tegas dan kurangnya pengawasan dari pihak berwajib juga membuat para elit partai atau bakal calon leluasa untuk melakukan hal tersebut bahkan secara terang-terangan.

2.4 Pengertian Pemilihan Umum

Pengertian Pemilihan Umum adalah suatu proses untuk memilih orang-orang yang akan menduduki kursi pemerintahan. Pemilihan umum ini diadakan untuk

mewujudkan negara yang demokrasi, dimana para pemimpinnya dipilih berdasarkan suara mayoritas terbanyak. Menurut Moertopo pengertian Pemilu sebagai berikut:

“Pada hakekatnya, pemilu adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai dengan azas yang bermasuk dalam Pembukaan UUD 1945. Pemilu itu sendiri pada dasarnya adalah suatu Lembaga Demokrasi yang memilih anggota-anggota perwakilan rakyat dalam MPR, DPR, DPRD, yang pada gilirannya bertugas untuk bersama-sama dengan pemerintah, menetapkan politik dan jalannya pemerintahan negara”.

Pemilihan umum digunakan di Negara demokrasi sebagai alat untuk memilih pemimpinnya. Pemimpin atau aparat pemerintah yang dipilih berdasarkan pilihan mayoritas warga masyarakat secara legal dan absolut akan menjadi pemegang kekuasaan pemerintah dalam jangka waktu tertentu.

2.4.1 Asas-Asas Pemilihan Umum

Dalam pelaksanaan pemilihan umum asas-asas yang tercantum dalam Undang-Undang No 07 Tahun 2017 Pada Bab 2 Pasal 2 diantaranya sebagai berikut:

a. Langsung

Langsung, berarti masyarakat sebagai pemilih memiliki hak untuk memilih secara langsung dalam pemilihan umum sesuai dengan keinginan diri sendiri tanpa ada perantara

b. Umum

Umum, berarti pemilihan umum berlaku untuk seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan, tanpa membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, golongan, pekerjaan, kedaerahan, dan status sosial yang lain.

c. Bebas

Bebas, berarti seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih pada pemilihan umum, bebas menentukan siapa saja yang akan dicoblos untuk membawa aspirasinya tanpa ada tekanan dan paksaan dari siapa pun.

d. Rahasia

Rahasia, berarti dalam menentukan pilihannya, pemilih dijamin suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan. .kerahasiaan pilihannya.

e. Jujur

Jujur, berarti semua pihak yang terkait dengan pemilu harus bertindak dan juga bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f. Adil

Adil, berarti dalam pelaksanaan pemilu, setiap pemilih dan peserta pemilihan umum mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

Didalam Undang-Undang No 07 Tahun 2017 Pada Bab 2 Pasal 3 juga tercantum asas-asas bagi pihak penyelenggara pemilu yang dalam hal ini merupakan KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan BAWASLU (Badan Pengawas Pemilu), berikut beberapa asas-asas bagi penyelenggara pemilu, diantaranya:

- a. Mandiri
- b. Jujur
- c. Adil
- d. Berkepastian Hukum
- e. Tertib
- f. Terbuka
- g. Proposional
- h. Profesional;
- i. Akuntabel
- j. Efektif dan
- k. Efisien.

2.4.2 Tujuan dan Fungsi Pemilu

2.4.2.1. Tujuan Pemilu

Pemilihan Umum Menurut Prihatmoko (2003), pemilu dalam pelaksanaannya memiliki tiga tujuan yakni:

- 1) Sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum (*public policy*).
- 2) Pemilu sebagai pemindahan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan badan perwakilan rakyat melalui wakil-wakil yang terpilih atau partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi masyarakat tetap terjamin.

- 3) Pemilu sebagai sarana memobilisasi, menggerakkan atau menggalang dukungan rakyat terhadap Negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik.
- 4) Memilih pemimpin idaman rakyat, pemimpin idaman rakyat artinya pemimpin yang mampu mengayomi rakyatnya dengan sepenuh hati tanpa paksaan dan berkerja secara transparan, mampu mengambil keputusan yang tepat, bijaksana, tegas, tetapi memiliki rasa kasih sayang yang tulus. Seorang pemimpin tidak hanya mampu mengambil hati rakyat saat pemilu tetapi juga mampu bekerja dengan hasil. Tidak hanya untuk kepentingan para elit atau orang golongan atas tetapi mampu merangkul dan menjangkau rakyat golongan menengah dan bawah.

Selanjutnya tujuan pemilu dalam pelaksanaanya berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 pasal 3 yakni pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPRD, Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

2.4.1.2 Fungsi Pemilihan Umum

Menurut Kansil dan Christine, Fungsi Pemilihan Umum sebagai alat demokrasi yang digunakan untuk:

- 1) Mempertahankan dan mengembangkan sendi-sendi demokrasi di Indonesia.

- 2) Mencapai suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila (Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia).
- 3) Menjamin suksesnya perjuangan orde baru, yaitu tetap tegaknya Pancasila dan dipertahankannya UUD 1945.

Pemilihan umum merupakan sebuah ajang yang akan menjadi sebuah dasar dari kehidupan masyarakat jika dilakukan dengan cara yang benar.

2.5 Kerangka Teori

2.5.1 Teori *Rational Choice*

Menurut Coleman, sosiologi memusatkan perhatian pada sistem sosial, dimana fenomena makro harus dijelaskan oleh faktor internalnya, khususnya oleh faktor individu. teori pilihan rasional Coleman ini tampak jelas dalam gagasan dasarnya bahwa tindakan perseorangan mengarah pada suatu tujuan dan tujuan tersebut adalah tindakan yang ditentukan oleh nilai atau preferensi (pilihan). Coleman menyatakan bahwa memerlukan konsep tepat mengenai aktor rasional yang berasal dari ilmu ekonomi yang melihat aktor memilih tindakan yang dapat memaksimalkan kegunaan ataupun keinginan serta kebutuhan mereka. Ada dua unsur utama dalam teori Coleman, yaitu aktor dan juga sumber daya.

- a. Sumber daya merupakan apa yang dimiliki oleh seseorang atau sesuatu yang dapat menarik minat seseorang untuk memilikinya

- b. Aktor merupakan seseorang yang memegang pilihan dan memiliki tujuan , seseorang yang dapat memilih apa yang bisa menjadi keuntungan bagi orang tersebut.

Teori *rational choice* merupakan teori dimana seseorang akan memilih sesuatu berdasarkan keuntungan yang akan dia dapatkan sebagai balasan dari pilihan yang dia ambil. dan keuntungan merupakan tujuan dari pilihan yang dilihnya semakin besar keuntungan yang akan dia dapatkan maka semakin besar kemungkinan pilihan itu akan diambil oleh orang tersebut.

2.5.2 Teori Interaksi Simbolik

Teori interaksi simbolik mengasumsikan bahwa individu-individu melalui aksi dan interaksinya yang komunikatif, dengan memanfaatkan simbol-simbol bahasa serta isyarat lainnya yang akan mengonstruksi masyarakatnya (Soeprapto, 2002).

Didalam teori ini menjelaskan bahwa sebuah interaksi yang terjadi di dalam masyarakat dapat disebabkan karena sebuah symbol yang disetujui dan disepakati didalam masyarakat. Dalam perspektif Blumer, teori interaksi simbolik mengandung beberapa ide dasar, yaitu:

- (1) Masyarakat terdiri atas manusia yang bertinteraksi. Kegiatan tersebut saling bersesuaian melalui tindakan bersama, membentuk struktur sosial
- (2) Interaksi terdiri atas berbagai kegiatan manusia yang berhubungan dengan kegiatan manusia lain. Interaksi nonsimbolis mencakup stimulus

respons, sedangkan interaksi simbolis mencakup penafsiran tindakan-tindakan

- (3) Objek-objek tidak memiliki makna yang intrinsik. Makna lebih merupakan produk interaksi simbolis. Objek-objek tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, yaitu objek fisik, objek sosial, dan objek abstrak
- (4) Manusia tidak hanya mengenal objek eksternal. Mereka juga melihat dirinya sebagai objek;

Didalam penelitian politik uang, uang, bantuan kebutuhan pokok dan fasilitas yang diberikan partai atau calon bakal terpilih dapat dijadikan sebuah symbol, yang digunakan untuk menarik interaksi atau perhatian masyarakat untuk mengambil sebuah tindakan yaitu memberikan hak pilihnya sebagai balasan dari symbol berupa uang, bahan kebutuhan pokok ataupun sebuah fasilitas umum yang diberikan.

Kedua teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori *Rational Change* dan teori Interaksi Simbolik. dan kedua teori ini memiliki kesesuaian dengan penelitian ini seperti pada contoh peristiwa berikut ini, pada Teori *Rational Change* sesuai dengan penelitian ini, karena masyarakat dalam memutuskan akan menerima atau menolak bentuk-bentuk kegiatan politik uang yang diberikan memerlukan pertimbangan antara keuntungan dan kerugian yang didapat. Keuntungan dari menerima bentuk-bentuk politik uang yang diberikan oleh partai politik atau calon bakal terpilih adalah jika berupa uang masyarakat bisa

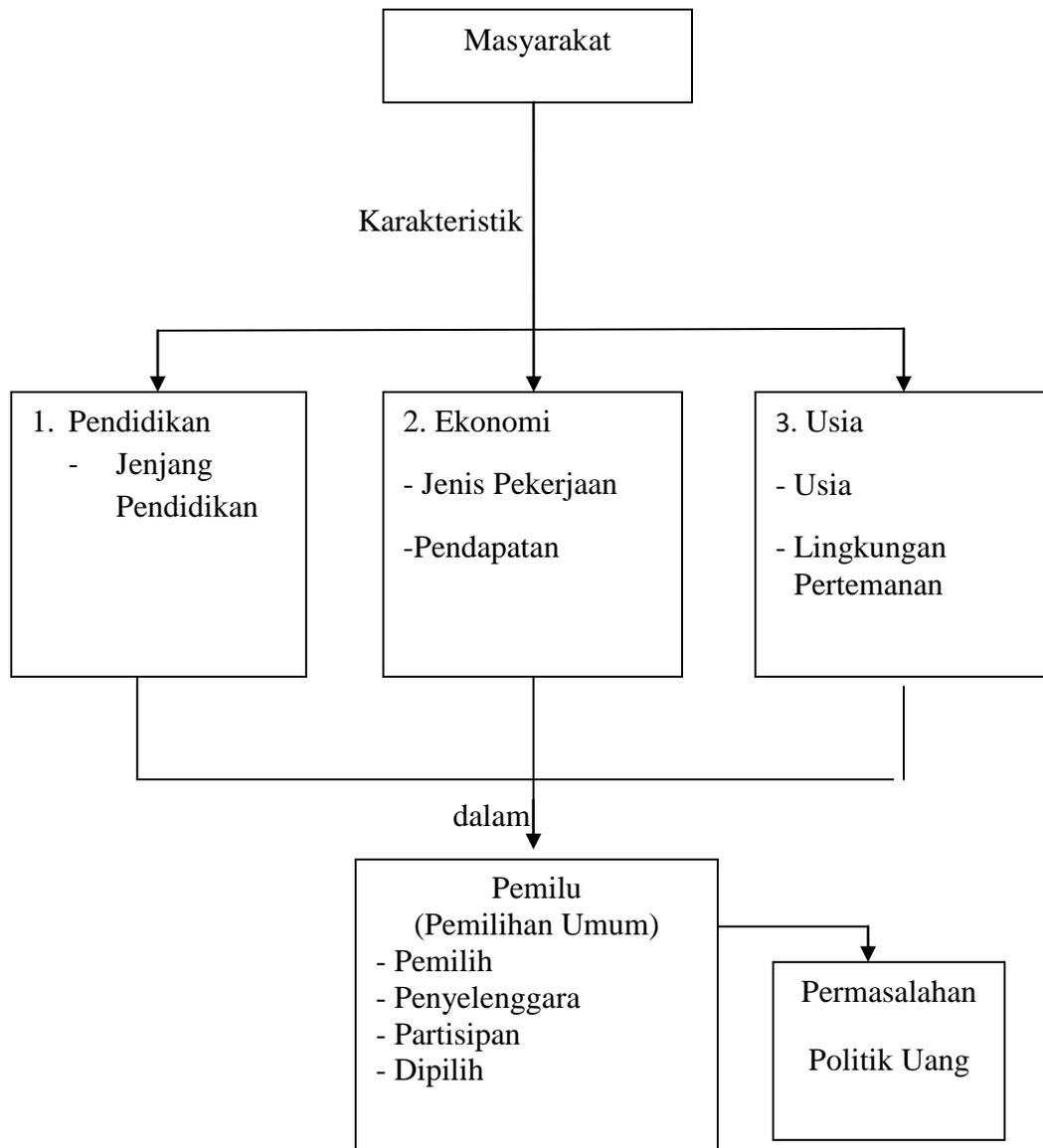
menggunakannya untuk membeli kebutuhan yang sedang diperlukan, jika berbentuk bahan kebutuhan pokok (sembako) atau jenis benda seperti sarung, kopiah, jilbab, atau gelas bisa digunakan untuk keperluan sehari-hari masyarakat, apabila dalam bentuk bantuan pembangunan fasilitas desa dapat membantu pemerintahan desa sebagai sarana perbaikan fasilitas desa dan bisa menghemat dana desa yang dikeluarkan untuk membangun atau memperbaiki fasilitas yang rusak atau tidak tersedia. Sedangkan kerugian yang akan didapatkan masyarakat yang menerima tidak terlalu besar karena belum ada sanksi tegas yang menjerat para pemilih bila menerima bentuk-bentuk politik uang, maka jika berdasarkan teori *Rational Change* masyarakat akan cenderung menerima pemberian bentuk-bentuk politik uang yang berasal dari partai politik atau calon bakal terpilih. Karena lebih besar nilai keuntungan daripada nilai kerugiannya yang diterima responden

Saat sudah menerima bentuk-bentuk politik uang yang diberikan oleh partai politik atau calon bakal terpilih hal ini akan sesuai dengan teori Interaksi Simbolik yang dikemukakan oleh Soeprapto. Didalam teori ini menjelaskan bahwa sebuah interaksi yang terjadi di dalam masyarakat dapat disebabkan karena sebuah simbol yang disetujui dan disepakati didalam masyarakat. Simbol dalam kegiatan politik uang adalah berupa barang-barang atau uang yang diberikan, saat masyarakat menerima barang tersebut dari pihak yang memberikan yaitu partai politik atau calon bakal terpilih akan mengharapkan pengakuan atau interaksi timbal balik dalam bentuk memberikan suaranya pada

pihak pemberi saat pemilihan suara dilakukan, tetapi karena asas pemilihan umum adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Maka responden masih bisa mengubah suara yang diinginkan maka interaksi simbolik yang dilakukan tidak memberikan hasil yang diharapkan oleh pihak pemberi simbol tersebut. Tetapi akan interaksi simbol akan berhasil apabila pihak penerima simbol yaitu para pemilih, memilih atau memberikan suaranya pada pihak pemberi simbol yaitu partai politik atau calon bakal terpilih,

2.6 Kerangka Pikir

Berikut ini merupakan kerangka pikir dalam penelitian ini



Gambar 2.2. Bagan Hubungan antara Karakteristik Masyarakat dengan Pemahaman Politik Uang pada Pemilihan Umum

Pemilihan umum (pemilu) merupakan sebuah proses yang bertujuan untuk memilih kepala daerah, wakil rakyat yang ditujukan untuk terciptanya sebuah pemimpin pilihan rakyat yang berkerja untuk rakyat. Sebuah pemilu dapat dinyatakan sukses apabila didalam pemilihan tidak terjadi pelanggaran yang dilakukan pihak-pihak tertentu dan banyaknya partisipasi warga dalam prosesnya. proses pemeliharaan umum merupakan wujud dari negara demokrasi, pemilihan umum dilakukan dalam 5 tahun sekali. Dalam pemilihan umum terdapat tahap kampanye yang dapat digunakan oleh calon bakal untuk mengenalkan diri, serta menyampaikan visi dan misi yang akan dilakukan jika calon bakal tersebut terpilih..

Keikutsertaan masyarakat didalam pemilihan umum merupakan wujud partisipasi masyarakat. Karakteristik dari masyarakat merupakan aspek yang diteliti menjadi dasar dari sikap warga masyarakat terhadap politik yang didalam pemilihan umum (pemilu). Didalam pemilihan umum masyarakat memiliki peran sebagai pemilih pemberi suara, penyelenggara (sebagai panitia dalam pemilu), dan sebagai partisipan seseorang yang ikut serta dalam proses tersebut bisa sebagai seorang pendukung dari bakal calon terpilih, ataupun sebagai pengawas jalannya pemilihan tersebut. Setiap masyarakat memiliki karakteristik yang berbeda-beda dari dalam bidang ekonomi, pendidikan, ataupun dalam lingkungan sosial.

Ekonomi merupakan kegiatan yang masyarakat lakukan setiap harinya dan merupakan faktor untuk bertahan hidup. Pendidikan hal yang penting bagi

kehidupan masyarakat karena memiliki dampak yang cukup besar bagi keseharian. Pendidikan bisa didapatkan dari pendidikan formal dan informal langsung atau pun tidak langsung. Usia merupakan ukuran angka seseorang, yang dimaksud dalam penelitian ini bagaimana sebuah ukuran dari seseorang dapat berpengaruh maka dari itu penelitian ini menfokuskan usia tersebut pada lingkungan sosial orang tersebut dari orang-orang yang ada disekitar subjek penelitian keluarga ataupun dari lingkungan pertemanan. Lingkungan sosial yang dimaksud adalah bagaimana orang tersebut mengambil peran dalam masyarakat, ataupun bagaimana hubungan yang tercipta dari seseorang didalam lingkungan masyarakat.

Perbedaan karakteristik masyarakat dan peran masyarakat didalam pemilihan umum memiliki dampak yang besar pada pengetahuan masyarakat terhadap kegiatan pemilihan umum, yang bisa dijadikan dasar untuk mengetahui seberapa luas pengetahuan masyarakat terhadap peristiwa pelanggaran politik uang yang sering terjadi selama masa pemilihan umum berlangsung.

2.7 Hipotesis

Penelitian ini menggunakan analisis korelasi koefisien kontingensi (*contingensi coefficient correlation*) untuk mengetahui apakah ada korelasi yang signifikan antara karakteristik warga masyarakat dengan tingkat pemahaman terhadap politik uang dalam pemilihan kepala daerah di Desa Wates Selatan. Berikut ini merupakan hipotesis dari penelitian ini :

H_a = Adanya hubungan antara karakteristik warga masyarakat terhadap tingkat pemahaman politik uang pada pemilihan umum.

H_o = Tidak adanya hubungan antara karakteristik warga masyarakat terhadap tingkat pemahaman politik uang pada pemilihan umum.

BAB III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *explanatory* (menjelaskan) dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, metode ini bertujuan untuk menjelaskan hubungan yang ada diantara variable melalui pengujian hipotesa. Penelitian kuantitatif menurut Arikunto (2006) merupakan pendekatan yang banyak dituntut menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran data serta dalam menampilkan hasil data penelitian. Dalam penelitian ini untuk menguji hubungan antara karakteristik pendidikan, ekonomi, dan usia terhadap pemahaman tentang politik uang pada pemilihan umum di daerah Wates Selatan

3.2 Penentuan Lokasi Penelitian

Lokasi yang menjadi dasar penelitian ini adalah Desa Wates Selatan, Desa Wates Selatan terdapat di Kec.Gadingrejo Kab.Pringsewu Provisi Lampung. Penelitian ini memilih lokasi tersebut karena lokasi sesuai karakteristik dan syarat untuk dijadikan lokasi penelitian. dan terdapat indikasi ditemukannya peristiwa politik uang pada masyarakat Desa Wates Selatan. dan diharapkan pemilihan lokasi

tersebut dapat memenuhi kebutuhan data yang dibutuhkan untuk menjawab masalah dalam penelitian.

3.3 Definisi Konseptual Dan Operasional Variabel

Menurut Singarimbun dan Effendi (1989) definisi konseptual merupakan pemaknaan dari konsep yang digunakan, sehingga memudahkan peneliti untuk mengoperasikan konsep tersebut pada saat penelitian. Sedangkan definisi operasional digunakan untuk memudahkan dan memahami apa indikator-indikator yang akan diteliti pada penelitian ini. Untuk menafsirkan maksud dari indikator yang ada agar lebih terperinci dan jelas. Dengan adanya definisi operasional ini maka akan diketahui pula fakta-fakta mengenai gejala-gejala yang jadi pokok penelitian. Pengertian dari variabel-variabel yang diteliti dan akan dianalisa lebih lanjut yaitu karakteristik masyarakat Desa Wates Selatan dan pemahaman masyarakat tentang peristiwa politik uang, yang dijelaskan pada tabel 3.1 tentang definisi konseptual dan operasional dibawah ini:

Tabel 3.1. Definisi Konseptual dan Definisi Operasional

No	Variabel	Definisi Konsep	Definisi Operasional	Indikator
1.	Karakteristik masyarakat	Karakteristik masyarakat merupakan sebuah perbedaan yang ada pada watak, sifat, karakter tubuh, kondisi sosial dan ekonomi dari manusia yang hidup bersama dengan manusia lain sebagai sebuah kelompok, yang disebut masyarakat.	Sesuatu hal yang membedakan seseorang dengan seseorang lainnya didalam sebuah kelompok sosial	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis kelamin • Pendidikan • Pekerjaan • Status pernikahan • Pendapatan
1.	Pemahaman masyarakat terhadap politik uang	Pengetahuan yang dimiliki masyarakat dalam menafsirkan atau mengidentifikasi kegiatan politik uang	Seberapa tingkat pemahaman masyarakat dalam menilai kegiatan politik uang	<ul style="list-style-type: none"> • Pemahaman tentang istilah politik uang • Pemahaman tentang bentuk-bentuk politik uang • Pemahaman tentang peraturan politik uang

Sumber: Data Primer, 2019

3.4 Populasi dan Sampel

3.4.1 Populasi

Populasi merupakan jumlah keseluruhan dari objek yang akan diteliti. Pada penelitian ini populasinya adalah seluruh warga masyarakat Desa Wates Selatan

yang sudah memiliki syarat sebagai pemilih dalam pemilihan umum. Warga dengan usia 17 tahun keatas atau sudah menikah dapat dijadikan populai dalam penelitian ini

3.4.2 Sampel

Sampel merupakan sebagian dari populasi yang dijadikan contoh dari populasi yang dianggap memenuhi syarat untuk dijadikan sampel pada penelitian ini. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan rumus slovin (2017) :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

keterangan :

n = Jumlah Sampel

N= Jumlah Populasi

E= Toleransi kesalahan dalam menetapkan sampel (dalam penelitian ini ditetapkan sebesar 10% atau 0.10)

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{1725}{1 + 1725 \cdot (0.10)^2}$$

$$n = \frac{1725}{18.25}$$

n= 94.52(dibulatkan menjadi 94 responden)

Jadi jumlah sample yang akan diuji dalam penelitian ini adalah 94 responden warga masyarakat Wates Selatan dengan kriteria usia diatas usia 17 tahun atau sudah menikah dan mempunyai hak pilih dalam pemilihan umum.

3.5 Jenis Data

Terdapat dua jenis data yang terdapat dalam penelitian ini, antara lain:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian atau dari responden saat melakukan penelitian. Data ini bisa didapatkan saat observasi langsung di lapangan.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang sudah ada atau data penelitian terdahulu yang bias dijadikan dasar dalam penelitian ini. Data yang diperoleh biasanya sudah diproses sehingga tinggal menggunakannya dalam penelitian.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Kuesioner

Kuesioner merupakan sekumpulan pertanyaan yang digunakan dalam penelitian kuantitatif yang berisi tentang pertanyaan yang akan menjadi data dalam penelitian. Kuesioner akan diberikan kepada sampel yang diambil dari populasi Desa Wates Selatan, yang berjumlah 94 responden. Kuesioner akan diberikan kepada warga masyarakat Desa Wates Selatan yang mempunyai hak pilih, berumur 17 tahun keatas atau sudah menikah. Dalam penelitian ini skala pengukuran yang digunakan adalah skala likert, skala likert menurut Sugiyono (2014) adalah skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial.

2. Observasi

Observasi merupakan pengamatan secara langsung yang dilakukan didalam sebuah penelitian, dalam hal ini observasi akan dilakukan di Desa Wates Selatan. Observasi dapat mengungkap fenomena yang tidak secara langsung didapat dari kuesioner yang disebar. Fenomena yang terjadi dilapangan akan sangat membantu penelitian karena akan menjadi data yang lebih terperinci karena dilihat secara langsung.

3. Studi Pustaka

Studi pustaka yaitu pengumpulan data berupa arsip, surat-surat, atau pun data-data tertulis lainnya yang akan membantu didalam penelitian, data bisa didapatkan dari perpustakaan ataupun kantor desa, ataupun sumber-sumber lainnya yang relevan.

4. Dokumentasi

Menurut Riduwan (2010) metode dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian meliputi buku-buku relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film documenter, dan data yang relevan. adapun alasan menggunakan metode dokumentasi adalah sebagai metode pendukung, karena didalam penelitian ini juga menyakut masalah-masalah yang ada hubungannya dengan sumber data documenter.

3.7 Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Tehnik pengolahan data dalam penelitian ini rnenggunakan program pengolah data SPSS dengan tahap-tahap sebagai berikut:

1. *Editing*, yaitu proses pemeriksaan kembali kuesioner yang telah terisi dilapangan (jika terdapat kesalahan atau kekeliruan, serta untuk melihat konsistensi jawaban dan kelengkapan pengisian kuesioner). Beberapa hal yang menyakut dalam proses *editing*, antara lain:
 - a. Kelengkapan pengisian kuesioner
 - b. Kejelasan jawaban responden
 - c. Kesesuaian jawaban responden satu dengan yang lainnya
 - d. Relevansi jawaban responden
 - e. Keseragaman satuan data
2. Membuat *format entry data* di program SPSS sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang terdapat di dalam kuesioner. Pada yang termasuk dalam tahap ini antara lain adalah proses *coding* atau proses pengkodean jawaban kuesioner yang sudah dijawab oleh responden.
3. *Entry data*, yaitu tahap memasukkan data yang telah didapatkan dari kuesioner kedalam program SPSS. Pada tahap ini hasil dari pengkodean jawaban yang sudah dilakukan pada proses sebelumnya yaitu pada tahap *entry data*, kode-kode tersebut dimasukan kedalam aplikasi SPSS.

4. *Prossesing data*, yaitu mengolah dan menyajikan data, baik dalam bentuk data statistik, tabel-tabel maupun grafik untuk menginventarisir semua variabel dan hubungan antar variabel.

Didalam penelitian ini teknik analisis terbagi menjadi dua jenis, antara lain:

1. Deskripsi data yaitu menjelaskan atau menggambarkan data yang sudah diperoleh sehingga mudah untuk dipahami, dan untuk menambah tingkat ketertarikan orang untuk membaca penelitian ini.
2. Pengujian korelasi menggunakan *Product Moment* yang digunakan untuk menguji hubungan antara variabel satu dengan variabel yang lainnya uji ini untuk membuktikan ada atau tidaknya hubungan antara variabel satu dengan variabel yang lain. Atau untuk menguji seberapa keeratan hubungan antara variabel satu dengan variabel lainnya. Berikut ini merupakan data table aturan pengambilan keputusan dalam penelitian ini:

Table 3.2 Aturan Pengambilan Keputusan Product Moment

No.	Parameter	Nilai	Interpretasi
1.	Nilai kolerasi yang di keluarkan oleh SPSS	$\rho \text{ hitung} \geq 0,05$	Ha ditolak Ho diterima
		$\rho \text{ hitung} \leq 0.05$	Ha diterima Ho ditolak
2.	Kekuatan kolerasi ρ hitung	0.000-0.199	Sangat Lemah
		0.200-0.399	Lemah
		0.400-0.599	Sedang
		0.600-0.799	Kuat
		0.800-1000	Sangat Kuat
3.	Arah kolerasi ρ hitung	+ (positif)	Searah, semakin besar nilai Xi semakin besar pula nilai Yi
		- (negatif)	Berlawanan arah, semakin besar nilai Xi. semakin kecil nilai Yi, dan sebaliknya

Sumber: Sugiyono, 2010

BAB IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Singkat Desa Wates Selatan

4.1.1 Sejarah Desa

Desa Wates Selatan dibuka pada zaman penjajahan Belanda tahun 1919 yang pada waktu itu dipimpin oleh Bapak Mantri Sarmo dan Bapak Pirnadi yang dikenal sebagai mantri (dokter) pada masa kolonisasi. Mayoritas penduduk berasal dari Jawa Tengah dengan kedatangan pertama berjumlah 200 kepala keluarga atau 1200 jiwa, lalu pada kedatangan kedua berjumlah 50 kepala keluarga atau 200 jiwa dan pada tahun berikutnya mencapai 1400 jiwa.

Pada waktu penjajahan dahulu Desa Wates merupakan daerah yang terletak di perbatasan antara tanah milik kolonialisasi dan tanah milik warga. Karena terletak di wilayah perbatasan maka daerah penelitian dinamakan dengan Desa Wates yang berarti “batas”. Pada awal diresmikan, Desa Wates memiliki luas wilayah sebanyak 350 Ha, yang dibagi menjadi lima pendukuhan (dusun), antara lain:

- 1. Pendukuhan Saribumi**
- 2. Pendukuhan Wates I**
- 3. Pendukuhan Tambahmulyo**

4. Pendukuhan Sidodadi

5. Pendukuhan Sidoharjo

Pada tanggal 6 September 2012 terjadi pemekaran wilayah desa, nama “Dusun Saribumi” berubah menjadi Desa Wates Selatan, dan Desa Wates Selatan menjadi desa yang memiliki otonomi daerah sendiri, serta memiliki dua dusun dan empat rukun tetangga (RT).

4.1.2 Sejarah Pemerintahan Desa

Tabel 4.1 Nama-Nama Kepala Desa
Desa Wates Selatan

No	Periode Jabatan	Nama Kepala Desa	Keterangan
1.	1919-1949	Kromo Sentoso	Alm
2.	1950-1965	Ngali Cokro Disastro	Alm
3.	1965	S. Sukarno	Pejabat Sementara
4.	1965-1966	Sirun Sastro Darminto	Alm
5.	1967-1974	S.Sumaryo	Alm
6.	1975-1976	A. Sabari	Alm
7.	1976-1997	Sudi Prayitno	Alm
8.	1998-2003-	Yudo Utomo	Alm
9.	2003	Rajimin	Pejabat Sementara
10.	2004-2015	Irwan Kristiana	
11.	2016-2019	Irhamzah, SS	Masih menjabat

Sumber: Profil Desa Wates Selatan, 2018

Dari data yang disajikan pada tabel 4.1 dapat diketahui nama-nama kepala Desa Wates Selatan yang sudah berakhir masa jabatan atau masih dalam masa periode jabatannya dan merupakan kepala desa aktif .

4.2 Geografis Desa

Desa Wates Selatan terletak di Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu Lampung. Dengan karakteristik desa yaitu daerah perbukitan, serta batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah utara :Desa Wates Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu

Sebelah selatan :Desa Paguyuban Kec. Way Halim Kab. Pringsewu

Sebelah barat :Desa Panjerejo Kec.Gadingrejo Kab. Pringsewu

Sebelah timur :Desa Tambahrejo Barat Kec. Gadingrejo

Kab. Pringsewu

Desa Wates Selatan terletak 5 KM dari wilayah ibu kota kabupaten Pringsewu, dengan jarak tempuh 15 menit dari wilayah desa menuju kantor kabupaten. Dengan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin sebagai berikut:

4.3 Keadaan Penduduk

Penduduk merupakan salah satu faktor sebuah desa dapat tebuat, karena definisi penduduk yang merupakan kumpulan dari beberapa individu yang hidup di tempat yang sama dan diakui secara hukum dilingkungan tersebut.

penduduk merupakan sumber daya yang dapat dikembangkan untuk melakukan perencanaan pembangunan desa untuk mengembangkan kemajuan desa. Dan berikut ini merupakan data tabel yang menjelaskan tentang jumlah penduduk Desa Wates Selatan.

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
Desa Wates Selatan Tahun 2018

Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk
Laki-Laki	873 Jiwa
Perempuan	853 Jiwa
Total	1726 Jiwa

Sumber: Profil Desa Wates Selatan, 2018

Berdasarkan tabel di atas ada 873 jiwa merupakan warga dengan jenis kelamin laki-laki dan ada 853 jiwa berjenis kelamin perempuan dengan total penduduk Desa Wates Selatan adalah 1726 jiwa. Mayoritas penduduk Wates Selatan merupakan warga dengan jenis kelamin laki-laki, hal ini disebabkan karena banyak warga berjenis kelamin perempuan setelah mereka menikah dengan laki-laki dari daerah yang berbeda, kebanyakan dari mereka memutuskan untuk pindah ke daerah lain.

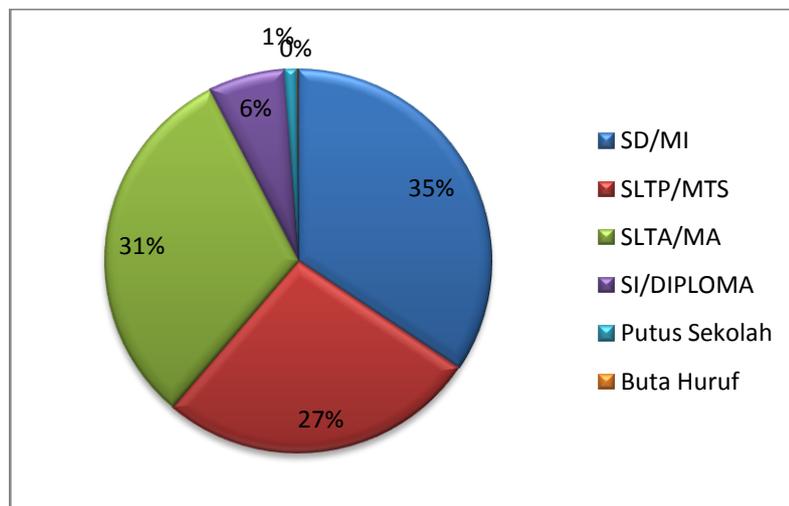
4.4 Keadaan Sosial

4.4.1 Pendidikan

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Nomor 20 Tahun 2003 mendefinisikan, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. dan berikut ini merupakan data pendidikan masyarakat Desa Wates Selatan:

Diagram 4.1 Tingkat Pendidikan Masyarakat
Desa Wates Selatan



Sumber: Profil Desa Wates Selatan, 2018

Dari diagram di atas dapat diketahui bahwa 35% atau 643 orang merupakan lulusan sekolah dasar, 27% atau 446 orang merupakan lulusan sekolah menengah pertama, 31% atau 503 merupakan lulusan sekolah menengah atas, 6% atau 82 orang merupakan lulusan sarjana atau diploma dan 1% atau 52 orang merupakan masyarakat yang mengalami putus sekolah dengan jumlah 1726 orang. dan dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat Desa Wates Selatan sudah menempuh pendidikan atau sedang melakukannya, dari

diagram di atas dapat disimpulkan juga bahwa tidak ada masyarakat yang merupakan warga buta huruf atau tidak bisa membaca. Dan di Desa Wates Selatan hanya tersedia fasilitas pendidikan berupa satu gedung TK/PAUD dan satu gedung sekolah dasar. Dikarenakan belum adanya pembangunan lebih lanjut mengenai fasilitas pendidikan yang ada di Desa Wates Selatan baik oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah desa setempat, sehingga banyak masyarakat Desa Wates Selatan memilih melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi di sekolah-sekolah yang berada di luar Desa Wates Selatan.

4.4.2 Keagamaan

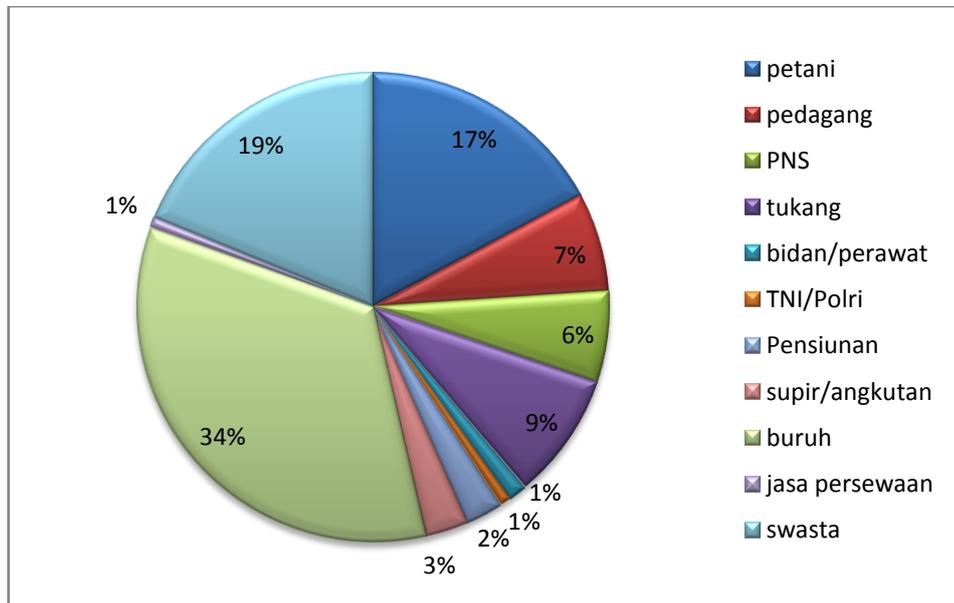
Agama adalah proses hubungan manusia yang dirasakan terhadap sesuatu yang diyakininya, bahwa sesuatu lebih tinggi dari pada manusia (Daradjat, 2005). Agama disebut sebagai ajaran yang diturunkan oleh Tuhan untuk petunjuk bagi umat dalam menjalani kehidupannya (Hadikusuma dalam Bustanuddin, 2006). Ada juga yang menyebut agama sebagai suatu ciri kehidupan sosial manusia yang universal dalam arti bahwa semua masyarakat mempunyai cara-cara berpikir dan pola-pola perilaku yang memenuhi untuk disebut “agama” yang terdiri dari tipe-tipe simbol, citra, kepercayaan dan nilai-nilai spesifik dengan mana makhluk manusia menginterpretasikan eksistensi mereka yang di dalamnya juga mengandung komponen ritual. Kegiatan keagamaan merupakan kegiatan penghubung diantara umat terhadap agama yang dianut atau kepada tuhan yang dipercayainya. Penduduk Wates

Selatan terdapat 1.711 warga masyarakat Desa Wates Selatan yang merupakan warga pemeluk agama Islam, dan ada sebanyak 15 warga masyarakat yang merupakan pemeluk agama Katolik. Dengan fasilitas keagamaan yang berjumlah 4 bangunan masjid atau mushollah yang merupakan tempat beribadah umat muslim. Hal ini dikarenakan mayoritas masyarakat Desa Wates Selatan beragama islam.

4.4.3 Perekonomian

Ekonomi adalah aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa. Ekonomi secara umum atau secara khusus adalah aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Aspek perekonomian dapat dilihat dari kegiatan masyarakat Desa Wates Selatan dalam sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan, Berikut ini merupakan diagram pekerjaan masyarakat Desa Wates Selatan, diantaranya:

Diagram 4.2 Data Pekerjaan Warga
Desa Wates Selatan Tahun 2018



Sumber: Profil Desa Wates Selatan, 2018

Dari diagram 4.2 dapat diketahui bahwa jumlah masyarakat yang berkerja adalah 543 orang, dengan jenis mata pencaharian yang cukup beragam yaitu mayoritas pekerja buruh berjumlah 185 orang terbagi menjadi buruh pabrik, buruh bangunan, dan buruh tani, lalu yang berkerja sebagai wiraswasta sebanyak 102 orang, selanjutnya yang berkerja sebagai petani berjumlah 93 orang banyaknya masyarakat yang berkerja sebagai petani karena luasnya lahan yang dijadikan sebagai lahan pertanian di Desa Wates Selatan berjumlah 2.5 Ha selain petani tanaman padi juga terdapat petani penanam kakao di Desa Wates Selatan dengan luas lahan yang dijadikan ladang kakao sejumlah 12 Ha, pedagang 37 orang terbagi menjadi pedagang kelontong, pedagang sayur, pedagang pakaian, pedagang bahan bangunan dan pedagang makanan jadi atau makanan siap makan, PNS (Pegawai Negeri Sipil) sebanyak 37 orang terbagi atas tenaga pengajar, tenaga kesehatan dan tenaga

pemerintahan, tukang bangunan 47 orang, perawat 7 orang, pensiunan 14 orang, supir angkutan 16 orang, kemudian 8 orang berkerja sebagai TNI atau Polri dan 8 orang bekerja sebagai jasa persewaan.

BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil pembahasan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Karakteristik masyarakat

Karakteristik merupakan sebuah pembeda antara satu dengan hal yang lain. Karakteristik dapat timbul sejak lahir ataupun dapat diperoleh dengan sebuah proses. Masyarakat merupakan sekumpulan orang yang tinggal dan menetap disuatu wilayah, didalam masyarakat sendiri terdapat pembeda antara satu dengan lainnya. Karakteristik yang membedakan tersebut bisa berupa jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan, status pernikahan, ataupun status ekonomi.

2. Pemahaman politik uang

Politik uang merupakan sebuah pelanggaran yang terjadi selama masa pemilihan umum berlangsung, pemilihan umum sendiri merupakan sebuah proses dimana masyarakat memilih pemimpin ataupun wakil rakyat yang bertugas untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. Pemahaman merupakan pengetahuan seseorang terhadap suatu hal secara dapat secara khusus ataupun umum. Pemahaman politik uang masyarakat Desa Wates Selatan dapat dikategorikan baik karena masyarakat mengerti dan dapat memahami makna kata politik uang, mengetahui bentuk-bentuk politik

uang, mengetahui peraturan yang mengatur tentang politik uang selain itu mengetahui badan yang menangani atau yang bertanggung jawab terhadap peristiwa politik uang yaitu BAWASLU.

3. Hubungan karakteristik masyarakat terhadap pemahaman politik uang di Desa Wates Selatan

Pada hal ini berdasarkan data penelitian terdapat hubungan diantara karakteristik masyarakat dengan pemahaman politik uang tetapi tidak secara signifikan karena karakteristik hanya akan mempengaruhi pengetahuan yang akan melahirkan sikap dan tindakan pada peristiwa politik uang, sementara pemahaman masyarakat lebih berasal dari pengalaman masyarakat selama mengikuti pemilihan umum.

6.2 Saran

Saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini

1. Untuk masyarakat, Agar lebih bersikap peduli terhadap lingkungan sekitar tentang hal-hal yang dapat merusak moral dan nilai yang berlaku, masyarakat diharapkan agar lebih bijak dalam menentukan sikap dan tindakan untuk menghadapi kegiatan politik uang, serta masyarakat harus lebih memahami haknya sebagai warga negara, karena memilih secara bebas tanpa adanya tekanan ataupun imbalan merupakan hak warga Negara, yang sepenuhnya juga menjadi kewajiban masyarakat dalam menjaga hak nya tersebut.
2. Untuk pemerintah, kurangnya sosialisasi tentang kegiatan politik uang merupakan salah satu penyebab kegiatan pelanggaran pemilihan umum

ini masih sering terjadi, dan badan atau lembaga pemerintah seperti BAWASLU ataupun PANWASLU diharapkan agar dapat mengoptimalkan pengawasan serta menindak pelanggaran yang terjadi sesuai dengan sanksi yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agenda, & JPPR. 2015. *Potret Pemilu Akses dalam Pemilu Presiden 2014 di Indonesia*. Agenda & JPPR, Jakarta
- Amzulian, Rifai. 2003. *Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Daerah*, Ghalia Indonesia. Jakarta
- Ardiantoro, Juri dkk. 2017. *Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014*. Komisi Pemilihan Umum. Jakarta.
- Badoh, I & Husodo A. 2009. *Memantau Korupsi Pemilu*, ICW & TIFA Foundation, Jakarta.
- Bastari, 2016. *Indonesia, Educational Statistics In Brief, 2015/2016*, MoEC, Jakarta
- Bustanuddin. Agus. 2006. *Agama dalam Kehidupan Manusia : Pengantar Antropologi Agama*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1994. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Kedua)*, Balai Pustaka, Jakarta
- Departemen Pendidikan Nasional, 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Dewey, John 1944. *Democracy and Education*. The Free Press
- Daradjat, Zakiyah, 2005. *Ilmu Jiwa Agama*, Bulan Bintang. Jakarta.
- Gibson, et al. 2000. *Organisasi. Jilid 1 dan 2. Ahli bahasa Agus Dharma*. Erlangga. Jakarta.
- Hastuti, dkk. (2012). *Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa Cangkringan dan Desa Dawuhan Kecamatan Talang Kabupaten Tegal*. Universitas Diponegoro. Semarang

- Husein, H 2015.*Api Pemilu Menuju Smart Election*, Perludem. Jakarta.
- Ishomuddin.2002.*Pengantar Sosiologi Agama*. Ghalia Indonesia.Jakarta.
- Ismawan, Indra.1999.*Money Politics Pengaruh Uang dalam Pemilu*. Media Pressindo. Yogyakarta.
- James, S. Coleman.2013,*Dasar-Dasar Teori Sosial Foundation of Sosial Theory* , Nusa Media,Bandung (diakses melalui <http://digilib.uinsby.ac.id/12889/5/Bab-2.pdf> Pada 30 September 2018)
- Kamil, Manik Husni dkk. 2015.*Pedoman Pendidikan Pemilih. Komisi Pemilihan Umum*. Jakarta
- Kumolo, Thahjo,2015, *Politik Hukum PILKADA Serentak*, PT Mizan Publika,Bandung
- Lileweri, Alo. 2005. *Prasangka dan konflik*. LKIS. Yogyakarta
- Poerwadarminta, 1974. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Penerbit Balai.Jakarta
- Singarimbun, M.1989. *Metode Penelitian Survai*. LP3ES. Jakarta.
- Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung
- Sunaryo. 2002. *Psikologi untuk keperawatan*. FGC. Jakarta
- Supriyanto Didik, *Koordinator Pengawasan Panwas Pemilu*, [Http:// Www.Panwaslu](Http://Www.Panwaslu), 5 Desember 2018).
- Warli, dan Epa Yuliana. 2011. *Peningkatan Kreativitas Pemecahan Masalah melalui Metode 'What's Another Way' pada Materi Bangun Datar Siswa Kelas VII SMP. Formatif. 1(3), p. 208-222.*

Jurnal

- Aditya, Ivan. 2011. *Arah Pendidikan Indonesia Masa Depan Belum Jelas. Kedaulatan Rakyat Online*. (diakses melalui <http://krjogja.com/read/103280/arrah-pendidikan-indonesia-masadepan-belum-jelas.kr>, Pada 20 September 2018)
- Agas, PunuAnto Erutan. 2007. *Mengkaji Potensi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk Pembuatan Kebiasaan Anti Kemiskinan di Indonesia* (diakses melalui <file:///C:/Users/G.computer%20psw/Downloads/11009-21027-1-PB.pdf> Pada 30 September 2018)

- Ahmadi, Dadi. 2008. *Interaksi Simbolik: Suatu Pengantar* (diakses melalui <file:///C:/Users/G.computer%20psw/Downloads/1115-2304-1-PB.pdf>, Pada 20 September 2018)
- Akbar, Andi. 2016. *Pengaruh Money Politics Terhadap Partisipasi Masyarakat pada Pilkada 2015 di Kabupaten Bulukumba* (Studi Kasus Desa Barugae Kec. Bulukumpa)(diakses melalui <file:///C:/Users/G.computer%20psw/Downloads/k/AKBAR.pdf> Pada 2 September 2018)
- Amanu, Mohamad. 2014. *Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus di Desa Jatirejo Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri)* (diakses melalui <file:///C:/Users/G.computer%20psw/Downloads/k/CURCSA-2v2.pdf> Pada 20 September 2018)
- Aminudin, Djoni. 2011. *Membangun Karakter Anak Melalui Bimbingan dan Konseling*. Sosio-Ekons, 2 (4), p. 28-43.
- Damanik. Caroline dan Hertanto. 2009. *Kemana Arah pendidikan Nasional*". *Kompas.com*. (diakses melalui <http://edukasi.kompas.com/read/2009/10/08/11453246/Ke.Mana.Arah.Pendidikan.Nasional>. Pada 20 September 2018)
- Hamdan Zoelva. 2014. *Instrumen Hukum dan Penindakan Money Politic*. (Diakses melalui: http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/34118878/CATATAN_TERHADAP_PENCEGAHAN_MONEY_politicslibre.pdf?AWSaccesskeyid=AKIAJ56TQJRTWSMTNPEA&Expires=1413044544&Signature=u1dds_vdsfeys7dzmsgrmfqhyghi%3D , diakses pada tanggal 15 September 2018)
- HL Rahmatiah. 2015. *Sikap dan Pengetahuan Masyarakat terhadap Money Politik dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014 Di Kabupaten Gowa* (diakses melalui <file:///C:/Users/G.computer%20psw/Downloads/k/1491-3048-1-PB.pdf> Pada 1 September 2018)
- Kamus Bahasa Indonesia Edisi Elektronik*. 2008 (diakses melalui <https://kbbi.web.id/karakteristik> , Pada 15 September 2018.)
- Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu. 2015. *Pengaruh Politik Uang terhadap Partisipasi dan Preferensi Politik Masyarakat Kota Kotamobagu* (Studi Kasus Pilwako 2013, Pileg Dan Pilpres 2014), (diakses melalui file:///C:/Users/G.computer%20psw/Downloads/k/Pengaruh_politik_uang_terhadap_partisipasi_Kota_Kotamobagu.pdf , Pada 20 September 2018)

- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana. 2015. *Laporan Hasil Penelitian: Pemetaan Persepsi Atas Penyelenggaraan Sosialisasi Kepemiluan, Partisipasi dan Perilaku Pemilih di Kabupaten Bangli*(diakses melalui <file:///C:/Users/G.computer%20psw/Downloads/k/ea303c551ea091a399e92bd1ed193d5.pdf>, Pada 20 September 2018)
- Pahri, Ripyal. 2017. *Demokrasi, Pemilihan Umum dan Kriteria Pemimpin Perspektif Yusuf Al Qaradhawi* (diakses melalui <file:///C:/Users/G.computer%20psw/Downloads/k/RIPYAL%20PAHRI%20-%20FAH.pdf>, Pada 5 September 2018)
- Peoni, Herianus. 2014. *Pengaruh Karakteristik Individu dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan* (Studi Pada PT. Taspen (Persero) Cabang Manado) (diakses melalui <file:///C:/Users/G.computer%20psw/Downloads/72838-ID-pengaruh-karakteristik-individu-dan-ling.pdf>, Pada 20 September 2018)
- Rusham, 2015. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Munculnya Money Politics (Studi Masyarakat. Kabupaten Bekasi Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014)* (Diakses Melalui [File:///C:/Users/G.Computer%20psw/Downloads/Ipi418542.Pdf](file:///C:/Users/G.Computer%20psw/Downloads/Ipi418542.Pdf) ,Pada 30 September 2018)
- Saputra, Ariandi. 2016. *Politik Uang dalam Pemilihan Legislatif di Kota Pekanbaru Tahun 2014* (diakses melalui <file:///C:/Users/G.computer%20psw/Downloads/ipi384210.pdf> Pada 2 September 2018)
- Sri, Utari Indah. 2016. *Pencegahan Politik Uang dan Penyelenggaraan Pilkada yang Berkualitas: Sebuah Revitalisasi Ideologi* (diakses melalui <file:///C:/Users/G.computer%20psw/Downloads/21327-Article%20Text-42844-1-10-20180207,.pdf> Pada 20 September 2018)
- Siswandi, 2016. *Persepsi Masyarakat Terhadap Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa Cemaga Selatan Kecamatan Bunguran Selatan Kabupaten Natuna Tahun 2013*(Diakses melalui <file:///C:/Users/G.computer%20psw/Downloads/k/JURNAL-WAWAN.pdf> ,diakses pada 30 September 2018)
- U.S. Supardi. 2012. *Arah Pendidikan di Indonesia dalam Tataran Kebijakan dan Implementasi*(diakses melalui [file:///C:/Users/G.computer%20psw/Downloads/234943-arrah-pendidikan-di-indonesia-dalam-tatar-c9d42cc6\(1\).pdf](file:///C:/Users/G.computer%20psw/Downloads/234943-arrah-pendidikan-di-indonesia-dalam-tatar-c9d42cc6(1).pdf), Pada 15 September 2018)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (diakses melalui <file:///C:/Users/G.computer%20psw/Downloads/UU-No.7-Tahun-2017-tentang-Pemilu.pdf>, Pada 20 Septemeber 2018)

Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (diakses melalui [file:///C:/Users/G.computer%20psw/Downloads/UU no 20 th 2003 .pdf](file:///C:/Users/G.computer%20psw/Downloads/UU%20no%20th%202003.pdf), Pada 20 September 2018)

Undang-undang pemilu No 10 pasal 84 ayat1 huruf J tahun 2008

Undang-undang pemilu tahun 2008